

SKRIPSI

**DISTRIBUSI PROGRAM PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**GINA PRATIWI
NIM: 18.2400.010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**DISTRIBUSI PROGRAM PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**GINA PRATIWI
NIM: 18.2400.010**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**DISTRIBUSI PROGRAM PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PETANI (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah**

**Program Studi
Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**GINA PRATIWI
NIM: 18.2400.010**

Kepada

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

20

iii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Tinjauan Ekonomi Syariah)

Nama : Gina Pratiwi

No Induk Mahasiswa : 18.2400.010

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B-4828/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2024

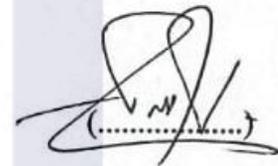
Disetujui Oleh:

Pembimbing

: Rusnaena. M.Ag.

NIP

: 19680295 2002 12 2 001



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Tinjauan Ekonomi Syariah)

Nama : Gina Pratiwi

No Induk Mahasiswa : 18.2400.010

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B-4828/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusnaena. M.Ag.

(Ketua)

()

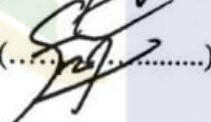
Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

()

Sulkarnain, M.Si.

(Anggota)

()

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammadun, M.Ag.

10208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Tinjauan Ekonomi Syariah)”. Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak Alm.Mustamin dan Ibu Samma, dimana dengan pembinaan dan berkah Doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Rusnaena. M.Ag. selaku pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof, Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang

- selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
 5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
 6. Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.
- Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Januari 2025
Penyusun,



Gina Pratiwi
NIM. 18.2400.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Pratiwi
NIM : 18.2400.010
Tempat/Tanggal Lahir : 07 Agustus 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten
Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani
(Tinjauan Ekonomi Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Januari 2025
Penyusun,



Gina Pratiwi
NIM. 18.2400.010

ABSTRAK

Gina Pratiwi, Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Tinjauan Ekonomi Syariah) (Dibimbing oleh Rusnaena)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang, untuk mendeskripsikan peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani dan untuk mendeskripsikan peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani ditinjau dari ekonomi syariah.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, teknik pengolahan data yaitu observasi dan wawancara kepada Dinas pertanian, pemerintah Desa dan kelompok tani warga kecamatan duampanua. Teknik analisis data yaitu data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan, penyaluran, pendistribusian, pengawasan dan pengontrolan pada produk pertanian, teknologi dan aspek pasar dengan pihak pemerintah desa diberikan kepada kelompok tani untuk peningkatan ketersediaan kebutuhan pertanian petani di Kecamatan Duampanua. 2) Peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai regulator yaitu menetapkan kebijakan, membangun infrastruktur dan memfasilitasi distribusi pertanian serta melakukan pengawasan efektivitas dan efisiensi program sebagai upaya peningkatan pendapatan petani dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. 3) Analisis syariah terhadap peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan secara adil dalam proses distributif serta mengimplementasikan seluruh prinsip ekonomi syariah yaitu tauhid, adil, nubuwwah, siddiq, amanah dan tablig dalam proses pendistribusiannya dalam meningkatkan kesejahteraan Petani.

Kata kunci: *Distribusi, Program Pertanian, Kesejahteraan Petani,*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Konseptual	34
D. Bagan Kerangka Pikir	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Dara.....	44
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pendistribusian Produk Pertanian	49



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Penelitian	111
2	Surat Izin Penelitian	112
3	Surat Melaksanakan Penelitian	113
4	Surat Keterangan Selasai Meneliti	114
5	Dokumentasi	115
6	Biografi Penulis	117



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	:	“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan

untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yaitu Negara dengan perekonomian yang bergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugrah bagi bangsa Indonesia yang harus dilestarikan untuk kesejahteraan hidup. Sepanjang sejarah Indonesia, bisnis pertanian (agribisnis) telah terbukti mampu memberikan kesempatan kerja. Belajar pada pengalaman puncak krisis ekonomi akhir periode tahun 1990an sektor pertanianlah yang telah berjasa menampung jutaan pengangguran tenaga kerja akibat reduksi besar-besaran pekerja industri.¹ Sehingga pembangunan di sektor pertanian merupakan pembangunan nasional yang sangat penting. Secara umum ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, dan Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.²

Secara hukum bahwa Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas pertanian. Meningkatkan produktivitas pertanian tentu diperlukan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan dapat diandalkan, yang mandiri, profesionalitas, berjiwa wirausaha,

¹ Paul McMahan, *Berebut Makan Politik Baru Pangan*, Roem Topatimasang, (Yogyakarta: Insistpress, Yogyakarta, 2017), h. 16.

² Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*, (Malang: UB Press, 2019), h. 7.

berdedikasi, disiplin dan moral yang luhur serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian mampu membangun usaha tani dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.³

Tolak ukur keberhasilan pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh peranan petani itu sendiri yang dalam kenyataannya tentu tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan pemerintah. Sebagai pembina dan pengayom pemerintah harus mampu memberikan terobosan baru dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani di setiap daerah, seperti mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata.⁴ Kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani di Indonesia termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menyatakan bahwa petani perlu mendapat perlindungan secara optimal dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan dalam : Memperoleh sarana dan prasarana produksi , kepastian usaha, resiko harga, kegagalan Panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.⁵

Mendorong laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui prioritas pembangunan guna mempercepat pembangunan daerah, memperbaiki dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian, maka diperlukan pengembangan dan pembinaan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komperatif. Seiring dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang

³ Maimuna Talaohu, Izazc Tonny Matitaputti dan Maryam Sangadji, Peran Pertanian dan Pengembangannya di Kabupaten Buru, (<https://media.neliti.com/publications/238163-analisis-peranan-sektor-pertanian-dan-pe-f71955a0.pdf>). Di akses pada tanggal 20 Agustus 2020

⁴ Agus Setiawan, Tetty Wijayanti, “Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Memotivasi Petani Melakukan UsahaTani Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palkaran Kota Samarinda”. *Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*. Vol. 14 No.2, September 2017, h. 78.

⁵ Syariah Semaun, , “Dampak Pandemi Covid-19: Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global.”(IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). Hal. 7.

pemerintah daerah dan Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka di era otonomi daerah ini suatu daerah dituntut untuk dapat menopang keberlanjutan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pembangunan daerah, khususnya perekonomian di sektor pertanian ini, Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia yang terletak di Sulawesi Selatan ini memiliki luas wilayah 1.962 km² dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 351.118 jiwa. Dengan luas wilayah pertanian mencapai 53 ribu hektar merupakan luas wilayah pertanian yang sangat potensial. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang masih relatif besar dalam pembentukan produk domestik bruto. Pada tahun 2019 sektor pertanian menempati urutan tertinggi dengan PDRB terbesar mencapai Rp 5,7 miliar dan memberikan kontribusi 44,64% dalam pembentukan PDRB kabupaten Pinrang.⁶

Sehingga sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang, Namun tidak dipungkiri bahwa sektor ini menghadapi masalah utama, yaitu rendahnya produktivitas petani di sektor pertanian yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya produksi hasil pertanian. Contohnya tanaman padi terlihat bahwa produksi tanaman padi di kabupaten Pinrang selama tahun 2013-2019 masih berfluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahunnya.

Kontribusi dari sektor pertanian ternyata tidak diimbangi dengan kebijakan yang sepenuhnya pro terhadap pertanian. Rencana strategis pembangunan

⁶ Andi Ahmad Taqwa, Tesis: "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Petani Padi di Kabupaten Pinrang", (Makassar, 2021), h. 2.

pertanian yang didalamnya cukup mendukung terhadap upaya pembangunan pertanian, pada kenyataannya setelah beberapa waktu berlangsung, belum banyak menunjukkan keterpihakan pemerintah terhadap petani dan sektor pertanian.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis bahwa terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu tidak meratanya distribusi pertanian hingga kepada petani sebagai subjek dalam pertanian daerah. Distribusi yang tidak merata ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses petani terhadap sumber daya dan layanan pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Diantaranya yaitu akses terhadap benih, pupuk, teknologi pertanian, pasar. Ketidakmerataan distribusi juga dapat menciptakan disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antarpetani sendiri, yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, serta berpotensi menciptakan ketegangan sosial di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian pemerintah Kabupaten Pinrang menjabarkan visi kabupaten Pinrang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”. Maka, Pemerintah kabupaten Pinrang harus mampu mengalakkan program-program dalam upaya mewujudkan visinya terkhusus menggali potensi daerahnya salah satunya yaitu sektor pertanian. Urgensi penelitian ini dilakukan untuk mengvaluasi seberapa adil distribusi dan meratanya pendistribusian tersebut. Penelitian ini menarik dikaji sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mewujudkan visi pemerintah dengan masyarakat sejahteranya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani ditinjau dari Ekonomi Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani?
3. Bagaimana analisis syariah terhadap peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mendeskripsikan peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani.
3. Untuk mendeskripsikan peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani ditinjau dari ekonomi syariah.

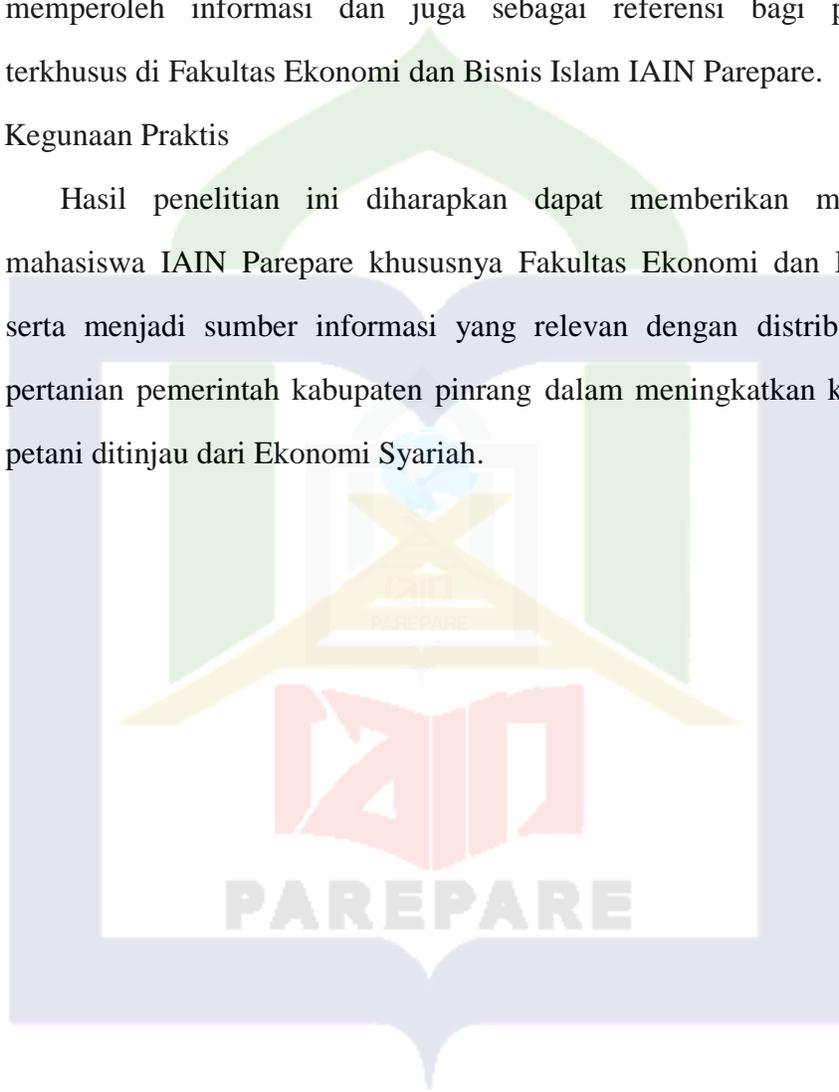
D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk memperoleh informasi dan juga sebagai referensi bagi perpustakaan terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta menjadi sumber informasi yang relevan dengan distribusi program pertanian pemerintah kabupaten pinrang dalam meningkatkan kesejahteraan petani ditinjau dari Ekonomi Syariah.



BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan sebelum mengangkat judul, dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, adapun objek dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Mohd Riswan Bin Jamal dengan judul penelitian *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi Menuju Sidenreng Rappang Sebagai Pusat Agribisnis”* berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan dua peran, yakni peran aktif berupa program perbenihan dan perlindungan serta produksi tanaman pangan, program penyuluhan dan kelembagaan. Sedangkan peran pemerintah partisipatif berupa program penyediaan sarana dan prasarana. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaannya yaitu membahas tentang peran pemerintah untuk meningkatkan pertanian. Sedangkan perbedaannya objek penelitian yaitu produksi pertanian. sedangkan penelitian kali ini membahas tentang produktivitas pertanian.⁷
2. Sunartomo dengan judul yaitu *“Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Jawa Timur”*. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa strategi kebijakan penyuluhan yang tepat untuk meningkatkan program-program terkait kelembagaan, kuantitas dan kualitas

⁷ Mohd Riswan bin Jamal, Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi Menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis, (Skripsi : Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), h. 9

penyuluh serta perbaikan kelembagaan kelompok tani. Tujuan yang harus dicapai adalah peningkatan mutu penyuluhan pertanian, sasaran dari tujuan tersebut adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan kelompok Tani. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang upaya meningkatkan produktivitas pertanian. sedangkan perbedaanya terletak pada subjek penelitian tentang kemampuan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian.⁸

3. Kasminng dengan judul *“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”* Tujuan penelitian ini untk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani. Adapun persamaan yaitu sama-sama ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian. adapun perbedaanya penelitian ini hanya fokus bagaimana cara memberdayakan para kelompok tani atau tidak membahas elemen-elemen yang ada pada pertanian.⁹
4. Asmawati Satti dengan judul *“Kebijakan Pembangunan Pertanian (Pemberdayaan Usaha Tani Bawang Merah di Desa Dulang Kecamatan Malua)”* berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian terhadap meliputi penguatan kelembagaan, melakukan pendidkan dan pelatihan, dan merencanakan penyediaan fasilitas pembiayaan dan dan permodalan berbentuk koperasi simpan

⁸ Aryo Fajar Sunartomo, Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Jawa Timur (Jawa Timur), *Agriekonomika* 5(2). 2021.

⁹ Kasming, Peran Dalam Pemberdayaan Kelompk Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Lompoloang kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 10

pinjam khusus untuk petani. terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini . persamaannya yaitu menawarkan beberapa program untuk Pertanian lebih baik. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang dimana penelitian ini spesifik pada pertanian bawang merah.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Atau bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹¹

Adapun pengertian peran menurut ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Sebuah Pengantar, menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan sesuatu atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa.¹² Status dan kedudukan

¹⁰ Asmawati Satti, Skripsi: “Kebijakan Pembangunan Pertanian (Pemberdayaan Usaha Tani Bawang Merah di Desa Dulang Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 54-62.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran, Akses <http://www.kbbi.web.id/peran>, (Jumat, 27 Januari 2019, 11:27 WIB)

¹² W.J .S. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735.

tidak dapat dipisahkan dengan peran tersebut. Sehingga setiap manusia memiliki peran sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat.¹³

Teori peran program pemerintah dalam melakukan distribusi mengacu pada bagaimana pemerintah memainkan berbagai peran untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya, layanan, atau bantuan mencapai target yang dituju dengan efektif dan efisien. Teori ini dapat dipahami melalui beberapa konsep utama yang menyoroti peran pemerintah dalam proses distribusi:

a. Peran Regulator

Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur proses distribusi. Tujuan dari peran ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa distribusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum serta standar yang berlaku. Fungsi utama dari peran tersebut yaitu menyusun dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang mengatur siapa yang berhak menerima bantuan, bagaimana bantuan tersebut didistribusikan, dan standar apa yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam distribusi. Pemerintah menetapkan regulasi mengenai kriteria penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat yang menerima bantuan. Selain itu, pemerintah dapat mengatur harga pangan pokok untuk menjaga stabilitas dan mencegah penimbunan

b. Peran Fasilitator

Pemerintah berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi infrastruktur, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk mendukung proses distribusi. Ini

¹³ Suwari Akhmaddhian, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No 3 September 2013. Akses 19 Juni 2024

mencakup menyediakan infrastruktur fisik seperti gudang dan transportasi, serta teknologi informasi untuk manajemen data penerima bantuan. Contohnya, pemerintah membangun jaringan gudang penyimpanan di daerah-daerah terpencil untuk memastikan distribusi pangan tetap terjaga

c. Peran Dinamisor

Pemerintah mendorong, memotivasi, dan mendukung para pelaku distribusi serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses distribusi. Peran ini mencakup pemberian insentif, pelatihan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas distribusi. Misalnya, pemerintah mengadakan pelatihan bagi petugas distribusi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen logistik dan memberikan insentif kepada perusahaan transportasi yang membantu mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah terpencil.

d. Peran Pengawasan

Pemerintah bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh proses distribusi. Peran ini penting untuk memastikan bahwa distribusi berjalan sesuai rencana, efektif, dan bebas dari penyelewengan atau korupsi. Misalnya, pemerintah melakukan audit rutin terhadap program bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada penerima yang berhak, serta menggunakan teknologi seperti sistem pelacakan elektronik untuk memonitor pergerakan dan distribusi bantuan secara real-time.¹⁴

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya "Kepemimpinan," peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Rivai menekankan

¹⁴ Hamid, Hendrawati. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat": De La Macca. 2018. h.67

bahwa peran juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja seseorang.¹⁵ Dalam konteks kepemimpinan, peran digunakan untuk menilai apakah seorang pemimpin mampu memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemimpin yang dimaksud dalam menjalankan peran ini termasuk pemerintah.

Peran seorang pemimpin, khususnya pemerintah, mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya.¹⁶ Pemerintah sebagai pemimpin harus dapat menunjukkan perilaku yang membawa perubahan positif dan kemajuan dalam masyarakat. Ini termasuk membuat kebijakan yang tepat, mengimplementasikan program yang efektif, dan memastikan bahwa semua sumber daya dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Rivai mengaitkan peran ini dengan kinerja seseorang. Seorang pemimpin yang efektif diukur berdasarkan kemampuan mereka untuk memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah, membuat keputusan yang tepat, dan memotivasi serta mengarahkan orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Rivai, *Veithzal. Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2022), h. 24

¹⁶ Marthen Moonti, *Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Hukum, 2019), Vol 20 (2), h. 28.

2. Peran Pemerintah

a. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata “Pemerintah” yang terdapat imbuhan awalan “pe” enjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara dan akhiran “an” menjadi kata “pemerintah” berarti perihal, cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimaasi tersebut.¹⁷

Pemerintah dalam arti sempit ataupun dalam arti luas adalah hanya untuk tingkat tertinggi janji politik seeptri presiden, perdana menteri dan anggota kabinet, yang terdiri dari seluruh organisasi yang melayani kepentingan publik serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan kolektif untuk masyarakat.¹⁸

Pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar Negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara.¹⁹

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan dan nahkoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada

¹⁷ Abu Daud Busroh, Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, (Jakarta,2019) h.87

¹⁸ Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah),(Sinar Grafika, Jakarta, 2021) h.87

¹⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2021) h.65

masa akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelolah dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.

b. Pengertian Peran

Peran adalah konsep dalam ilmu sosial yang mengacu pada perilaku dan tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat atau organisasi. Peran mencakup serangkaian harapan sosial terkait dengan bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan berfungsi dalam suatu konteks tertentu, sesuai dengan status atau jabatan yang dipegangnya.²⁰ Peran juga menggambarkan tanggung jawab dan tugas yang melekat pada posisi tersebut, serta bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial atau profesionalnya.²¹ Peran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku tetapi juga sebagai alat untuk menilai kinerja seseorang, terutama dalam hal efektivitas dan kontribusi terhadap tujuan bersama. Menurut Didit, peran dapat dijadikan tolak ukur kinerja seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam membawa perubahan dan kemajuan yang diharapkan.²²

c. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Lahirnya pemerintah pada awalnya hadir untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat menjalankan kehidupan secara baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan yang menjadi ciri khasnya, peran

²⁰ Adedevi. *Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*. (<http://carapedia.com/pengertian definisi peran>) Akses 19 Juni 2024

²¹ Daft L, Richard. *Manajemen*. (Jakarta : Erlangga, 2018) h.76

²² Didit. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya:(Penerbit PT. Jepe Press Media Utama, 2018) h.67

pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dapat dikatakan adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai kemajuan bersama.²³

Pemerintah hadir karena adanya komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang dimana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat mempercayai bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.²⁴ Ndraha mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berbentuk jasa publik serta layanan civil.²⁵

Tugas-tugas Pokok Pemerintah:

1. Memastikan keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan.
2. Menjaga ketertiban dengan mencegah konflik diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

²³ Robert. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: SalembaEmpat, 2018) h.45

²⁴ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Ghalia, JakartaIndonesia, 2020) h.433

²⁵ Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (PT. Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2018) h.34

3. Menjamin keadilan bagi setiap warga negara tanpa melihat status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum serta memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.²⁶

d. Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam pelaksanaan sistem kenegaraan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah adalah penguasa yang memerintah pemerintah di daerah lewat otonomi daerah.²⁷ Menurut Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah memiliki fungsi dalam menjalankan peran demi terselenggara jalannya pemerintahan. Adapun fungsi pemerintah daerah Undang-undang No.23 Tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan.

²⁶ Lasiman Sugiri, “ Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Publica 2019, Vol 2 (1), h. 7

²⁷ Stella Grace Ira Pogaga, Paulus Kindangen, Rosalina AM koleangan, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2021, Vol 21 (1),h. 54-70.

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintah daerah yang dimaksud peneliti yaitu tinjauan pemerintah daerah tingkat kabupaten. Pemerintah daerah kabupaten terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil bupati. Jika dihubungkan peran dan pemerintah daerah kabupaten, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah memiliki tujuan utama untuk bertanggung jawab melindungi, menjamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan rencana pembangunan daerah.

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok menikmati kualitas hidup yang baik dan merasa sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta akses terhadap sumber daya yang memungkinkan partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup perasaan aman,

kepuasan, dan kebahagiaan yang berasal dari hubungan yang sehat, pekerjaan yang memadai, dan lingkungan hidup yang kondusif. Secara lebih luas, kesejahteraan juga melibatkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimal mereka.²⁸

Konsep sejahtera mencakup keadaan di mana individu atau kelompok merasa puas dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka secara memadai. Sejahtera tidak hanya terkait dengan aspek materi, tetapi juga melibatkan kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial yang baik, serta rasa memiliki tujuan dan makna dalam kehidupan.²⁹ Sejahtera juga mencakup perasaan keamanan, keseimbangan, dan kebahagiaan yang muncul dari pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Konsep sejahtera tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis dan berkaitan dengan perkembangan individu sepanjang hidup mereka.

Seseorang dapat dikatakan sejahtera ketika mereka merasa puas dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka secara memadai dalam berbagai aspek kehidupan.

Pertama, dalam aspek fisik, seseorang merasa sehat secara fisik dan memiliki akses terhadap perawatan medis yang memadai.

Kedua, dalam aspek emosional, mereka memiliki keseimbangan emosional, mampu mengelola stres, dan merasa bahagia serta puas dengan kehidupan mereka.

²⁸ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa", 2019, h. 4.

²⁹ Trigati Widya Lestari Wibowo, Tesis: "Peningkatan Produktivitas Pertanian Padi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mewujudkan Smart Agriculture dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Dinamik"(Surabaya:ITSN, 2019), h. 8-9

Ketiga, dalam aspek sosial, mereka memiliki hubungan yang positif dan mendukung dengan orang lain, merasa terhubung dengan komunitas, serta memiliki dukungan sosial yang memadai.

Keempat, dalam aspek ekonomi, mereka memiliki cukup sumber daya finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, serta memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang stabil. Selain itu, seseorang yang sejahtera juga memiliki rasa memiliki tujuan hidup dan merasa bahwa hidup mereka memiliki arti dan makna. Keseluruhan, seseorang dapat dikatakan sejahtera ketika mereka merasa seimbang dan memadai dalam semua aspek kehidupan mereka, serta memiliki perasaan yang kuat dari kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan ekonomi.³⁰

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kondisi kesejahteraan suatu populasi atau kelompok. Tiga indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat termasuk indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator Kesehatan :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. PDB per kapita menunjukkan kemakmuran relatif masyarakat, sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan mencerminkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan kebutuhan dasar.
2. Pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat kejahatan. Pendidikan dan tingkat melek huruf adalah penentu penting dalam peningkatan kemampuan individu

³⁰ Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2021) h.87

untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sementara tingkat kejahatan mencerminkan tingkat keamanan dan stabilitas sosial.

3. Kesehatan mencakup harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Harapan hidup menunjukkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan tingkat kematian bayi mencerminkan kesehatan ibu dan bayi serta akses terhadap perawatan medis yang memadai.³¹

Dengan memonitor dan menganalisis indikator-indikator ini, pemerintah dan organisasi dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program kesejahteraan serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai aspek kehidupan yang saling terkait dan kompleks. Beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup tingkat penghasilan, lapangan kerja yang tersedia, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta stabilitas ekonomi. Tingkat penghasilan yang rendah dan ketidakstabilan ekonomi dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.³²

³¹ Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) h.78

³² Mulia Ananda, Skripsi. "Pengaruh Produktivitas Pertanian Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Padi di Desa Buabua 1, Kabupaten Pinrang (Persepektif Ekonomi Syariah)." (IAIN Parepare, 2024). Hal. 90-92.

2. Faktor sosial seperti pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan penghasilan yang memadai. Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat.
3. Faktor lingkungan termasuk ketersediaan sumber daya alam, polusi lingkungan, dan perubahan iklim juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air bersih, udara bersih, serta akses terhadap lingkungan yang aman dan bersih memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan fisik masyarakat.³³

Selain itu, faktor budaya dan politik juga turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Budaya yang mendukung kerjasama dan solidaritas sosial dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara politik yang stabil dan pemerintahan yang transparan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan

4. Tinjauan Ekonomi Syariah

a. Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang maupun jasa.³⁴ Sedangkan ekonomi syariah dapat diartikan sebagai

³³ Amin. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang EraDesentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol (13) (2) : 36-49 Akses 19 Juni 2024

³⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h.87

kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah swt.³⁵

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁶ Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem.³⁷

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.³⁸

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah salah satunya menurut Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa Ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.³⁹ Dan Menurut Djamil Ahmad mendefinisikan ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2018) h.76

³⁶ Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (2018) h.56

³⁷ Afandi Yazid, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019) h.45

³⁸ M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.89

³⁹ Abdul Manan H, *Hukum Ekonomi Syariah, .Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015) h.34

manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.⁴⁰ Sedangkan menurut Latif menjelaskan bahwa Ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi serta distribusi sumberdaya yang langkahnya sejalan dengan syariat Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidaksinambungan ekonomi makro.⁴¹

Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Nawawi ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴²
- 2) Menurut Syafi'e, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.⁴³
- 3) Menurut Rianto, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁴⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber

⁴⁰ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.56

⁴¹ Latief, AH. Azharudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015) h.23

⁴² Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.67

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h.90

⁴⁴ Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam* , (Solo: PT. Era Audicitra Intermedia, 2011) h.45

dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Karena ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Berikut ini beberapa penjelasan perbedaan yaitu:⁴⁵

- 1) Sistem ekonomi syariah mengedepankan prinsip kerjasama dan saling berbagi sedangkan ekonomi konvensional cenderung mengutamakan bunga (riba) dalam usaha mendapatkan keuntungan.
- 2) Sistem ekonomi syariah menganggap sumber daya alam yang ada merupakan pemberian Allah sehingga wajib dipergunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab.⁴⁶ Sedangkan ekonomi konvensional cenderung menganggap sumber daya alam sebagai komoditas ekonomis yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Sistem ekonomi syariah menganggap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dan tidak jelas hukumnya maka tidak diakui, sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung berorientasi pada pencapaian laba (keuntungan) yang sebesar-besarnya meskipun bisnis atau usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Secara istilah atau terminologi, jual beli terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama' dengan tujuan dan substansi

⁴⁵ Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017) h.67

⁴⁶ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.45

yang sama, Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa system jual beli prinsip syariah mengusung unsur kejujuran didalamnya sebagaimana diejlaskan dalam hadist Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber pada Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابزار والحاكم)

Artinya :

Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁴⁷

Sistem ekonomi syariah yang bertujuan masalah bagi seluruh umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengkoordinasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al Qur'an dan Sunnah sebagai acuan aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam.⁴⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa 4/29, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁴⁷ Al-Hakim, *Al-Adabul Mufrad Juz Iv* (Kairo: Darwa Mathba Asy-Sya'biy) h.45

⁴⁸ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.67

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁴⁹

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah bahwa Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam perniagaan, senantiasa seseorang untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan dalam agama, dan tidak untuk memakan harta sesama mereka dalam jalan yang batil.

b. Nilai dan prinsip ekonomi syariah

1) Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”,

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) h.78

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2012) h.89

dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.⁵¹

2) Adl'

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhlukNya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di muka bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.⁵²

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) h.56

⁵² Salmiah Mattoreang, Skripsi:”Konsep Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ibnu Khaldun,”(IAIN Parepare, 2022). Hal 57-59

3) Nubuwwah

Karena sifat rahman, rahim, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) kepada Allah. Untuk umat muslim Allah mengirimkan Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna untuk diteladani yaitu Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad saw yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1) Sidiq

Sifat sidiq (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap Muslim. Karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kahidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidaup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep sidiq ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar).

2) Amanah

Amanah (tanggungjawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat

menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanah yang telah dipikulnya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memerankan peranan yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini apabila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh merupakan prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, iklim keterbukaan, dan lain-lain.

4) Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehNya. “dan Allah menimpakan kemakmuran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya.

5) Khilafah

Dalam Al Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik di sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi

6) Ma'ad

Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk berjuang. Dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, sedangkan perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad juga diartikan sebagai imbalan/ ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, difokuskan oleh Al Gazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba dunia maupun akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi (hak kekuasaan) dalam Islam.⁵³

c. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

⁵³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h.56

1) Alqur'anul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar.⁵⁴ Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, Sebagaimana mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

2) Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3) Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadist.

4) Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

⁵⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2016) h.89

5) Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.⁵⁵

d. Ciri Khas Ekonomi Syariah

Al-Quran tidak banyak dibahas karena hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar saja. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian dikembangkan sistem yang sesuai dan tidak menyimpang.⁵⁶ Di dasari alasan yang tepat, al-quran dan sunnah banyak sekali membahas bagaimana seharusnya umat Islam bersikap sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal tetapi hanya membahas sedikit tentang masalah sistem ekonomi.⁵⁷

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ekonomi menurut pandangan Islam harus dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada semua pelaku usaha. Karena itu ekonomi syariah juga merujuk pada hal tersebut. Ekonomi syariah juga menekankan empat sifat, yaitu:

- 1) *Unity* (Kesatuan)
- 2) *Equilibrium* (Keseimbangan)
- 3) *Free Will* (Kebebasan)
- 4) *Responsibility* (Tanggung Jawab).⁵⁸

⁵⁵ Abdul, Manan H. *Hukum Ekonomi Syariah, .Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media.2015) h.90

⁵⁶ Iska, *Lembaga Syariah* (Batu sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2015) h.45

⁵⁷ Sudirman, Lu, Damirah, I Nyoman Budiono, “Pengembangan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare”. *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum* 16 (1), 16-31, 2018 hal 28-29.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h.67

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai falah.⁵⁹ Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

Ajaran dalam Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Menurut Imam An-Nawawi dalam dalam shahihnya, pekerjaan yang baik dan afdhal ialah pertanian karena ia merupakan hasil tangannya sendiri dan ia juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umat Islam dan juga kepada binatang. Dengan banyaknya syariat yang tidak bisa lepas dari pertanian, dan pertanian itu sendiri tidak bisa lepas dari kehidupan, maka tidak berlebihan kita berkesimpulan bahwa persoalan pertanian adalah persoalan umat yang menjadi amanah manusia hidup di dunia sebagai khalifah di muka bumi.

“Andaikan Kiamat tiba dan ditangan seseorang dari kamu ada sebatang anak kurma, maka hendaklah ia tanpa berlembah-lembah lagi untuk menanamnya”

Hadist ini mengisyaratkan betapa pentingnya pertanian sampai kapan pun. Namun ketika pertanian kurang mendapat perhatian, maka ia akan memberikan kesan dan dampak yang besar. Hal ini terbukti ketika perekonomian Indonesia yang berazaskan pertanian yang dialihkan pada perekonomian yang berbasis industrialisasi. Akibatnya produktifitas pertanian mengalami penurunan dan ini

⁵⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: PT. Interpratama Mandiri, 2016) h.90

berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Namun ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, justru sektor pertanianlah yang menyelamatkan Indonesia.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan seluruh penjelasan pada kerangka teori diatas adapun konseptual penelitian ini ayitu sebagai berikut:

1. Peran Distribusi Pemerintah

Konsep ini mengacu pada peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam distribusi sumber daya, layanan, atau bantuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Peran ini mencakup berbagai fungsi, seperti regulasi, fasilitasi, dinamisasi, dan pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan distribusi dilakukan dengan efektif, adil, dan berkesinambungan. Indikator dalam peran distribusi pemerintah berdasarkan teori peran distribusi pemerintah yaitu:

a. Peran Regulator

Pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan untuk mengatur distribusi agar dilakukan secara adil dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini mencakup menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dan bagaimana distribusinya dilakukan, serta mengatur harga pangan pokok untuk menjaga stabilitas pasar.

b. Peran Fasilitator

Pemerintah menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses distribusi, seperti gudang penyimpanan dan transportasi. Mereka juga memberikan dukungan teknologi informasi untuk

manajemen data penerima bantuan, misalnya dengan membangun jaringan gudang di daerah terpencil.

c. Peran Dinamisator

Pemerintah mendorong partisipasi aktif dalam distribusi dengan memberikan insentif, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pelaku distribusi dan masyarakat. Contohnya, mereka mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen logistik dan memberikan insentif kepada perusahaan transportasi.

d. Peran Pengawasan

Pemerintah memonitor dan mengevaluasi seluruh proses distribusi untuk memastikan keefektifan dan mencegah penyelewengan atau korupsi. Mereka melakukan audit rutin pada program bantuan sosial dan menggunakan teknologi seperti pelacakan elektronik untuk memantau distribusi secara real-time.

2. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani dapat diukur dari berbagai aspek, seperti pendapatan, akses terhadap sumber daya, kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan petani menjadi fokus utama untuk dipahami bagaimana peran distribusi pemerintah memengaruhi kondisi dan tingkat kesejahteraan mereka.

Berikut indikator dari kesejahteraan petani yaitu:

1. Pendapatan

Tingkat pendapatan petani mencerminkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta akses mereka terhadap sumber

daya ekonomi. Pendapatan yang cukup memungkinkan petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan investasi dalam pengembangan pertanian.⁶⁰

2. Akses terhadap sumber daya

Akses petani terhadap sumber daya seperti lahan, air, benih, dan pupuk memengaruhi produktivitas dan hasil pertanian mereka. Dengan akses yang memadai, petani dapat mengoptimalkan potensi lahan dan meningkatkan produksi.⁶¹

3. Kesehatan

Kesejahteraan petani juga terkait dengan kesehatan mereka dan keluarga mereka. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental petani, serta mengurangi risiko kehilangan produktivitas akibat penyakit.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan petani dan anggota keluarganya berpengaruh pada pemahaman mereka tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien, serta membuka peluang akses terhadap informasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas.

5. Stabilitas sosial

Kesejahteraan petani juga terkait dengan stabilitas sosial di komunitas mereka. Stabilitas ini mencakup keamanan dalam beraktivitas pertanian, serta

⁶⁰ Akbar, Muhammad, Zainal Said, dan Rusnena. "Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang". *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1 (2), 59-69, 2019 hal 62.

⁶¹ Astuti, An Ras. (2022) *Upaya Pembelaan Komunitas Generasi Petani Perempuan atas Perampasan Hak Atas Air di Kelurahan Lemoe Parepare*.

dukungan dan kerja sama dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga finansial, dan masyarakat lokal.

Peran distribusi pemerintah memengaruhi kondisi dan tingkat kesejahteraan petani. Upaya pemerintah dalam memastikan distribusi sumber daya dan layanan yang adil dan efektif akan berdampak positif pada berbagai aspek kesejahteraan petani.⁶²

3. Tinjauan Ekonomi Syariah

Konsep ini mengacu pada pendekatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang meliputi keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Berikut indikator tinjauan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:⁶³

a. Tauhid

Konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik sejati dari segala sumber daya, termasuk hasil pertanian.⁶⁴ Dalam distribusi program pertanian, prinsip tauhid mengingatkan bahwa tujuan utama dari distribusi adalah untuk memastikan bahwa hasil pertanian didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh petani, sesuai dengan kebutuhan dan upaya mereka.

b. Adl'

Prinsip keadilan (adl') dalam Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam ekonomi.⁶⁵ Dalam konteks pertanian, distribusi program-program pertanian harus dilakukan secara adil agar semua petani memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka.

⁶² Gunawan. *Ekonomi Produksi*. (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2020) h.90

⁶³ Zainudin Ali, *Hukum ekonomi Syariah*, “Jakarta : Sinar Grafika, 2019) h.87

⁶⁴ Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) h.56

⁶⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h.47

c. Nubuwwah

Ajaran nubuwwah menekankan pentingnya petani sebagai bagian dari umat manusia yang harus diberi petunjuk dan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Distribusi program pertanian harus mencakup penyuluhan dan bimbingan kepada petani dalam menerapkan praktik-praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan.

d. Sidiq

Sifat kejujuran dan kebenaran (sidiq) menjadi landasan dalam distribusi program pertanian. Informasi yang diberikan kepada petani mengenai program-program pertanian haruslah jujur dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani dalam mencapai kesejahteraan mereka.⁶⁶

e. Amanah

Distribusi program pertanian harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan (amanah), memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang diberikan kepada petani digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan pertanian.

f. Tabligh

Konsep tabligh mengajarkan pentingnya menyampaikan informasi dan bimbingan kepada petani mengenai program-program pertanian yang tersedia.

⁶⁷Distribusi program pertanian harus mencakup upaya komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa petani memahami dan dapat mengambil manfaat dari program-program tersebut.

⁶⁶ Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2016) h.87

⁶⁷ Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, h.90

g. Fathonah

Sifat kecerdikan dan kebijaksanaan (fathonah) dalam distribusi program pertanian menekankan pentingnya merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi petani secara lokal, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

h. Khilafah

Prinsip khilafah menekankan tanggung jawab setiap individu, termasuk pemerintah, dalam menjaga kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, termasuk petani. Distribusi program pertanian harus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai khalifah di bumi.

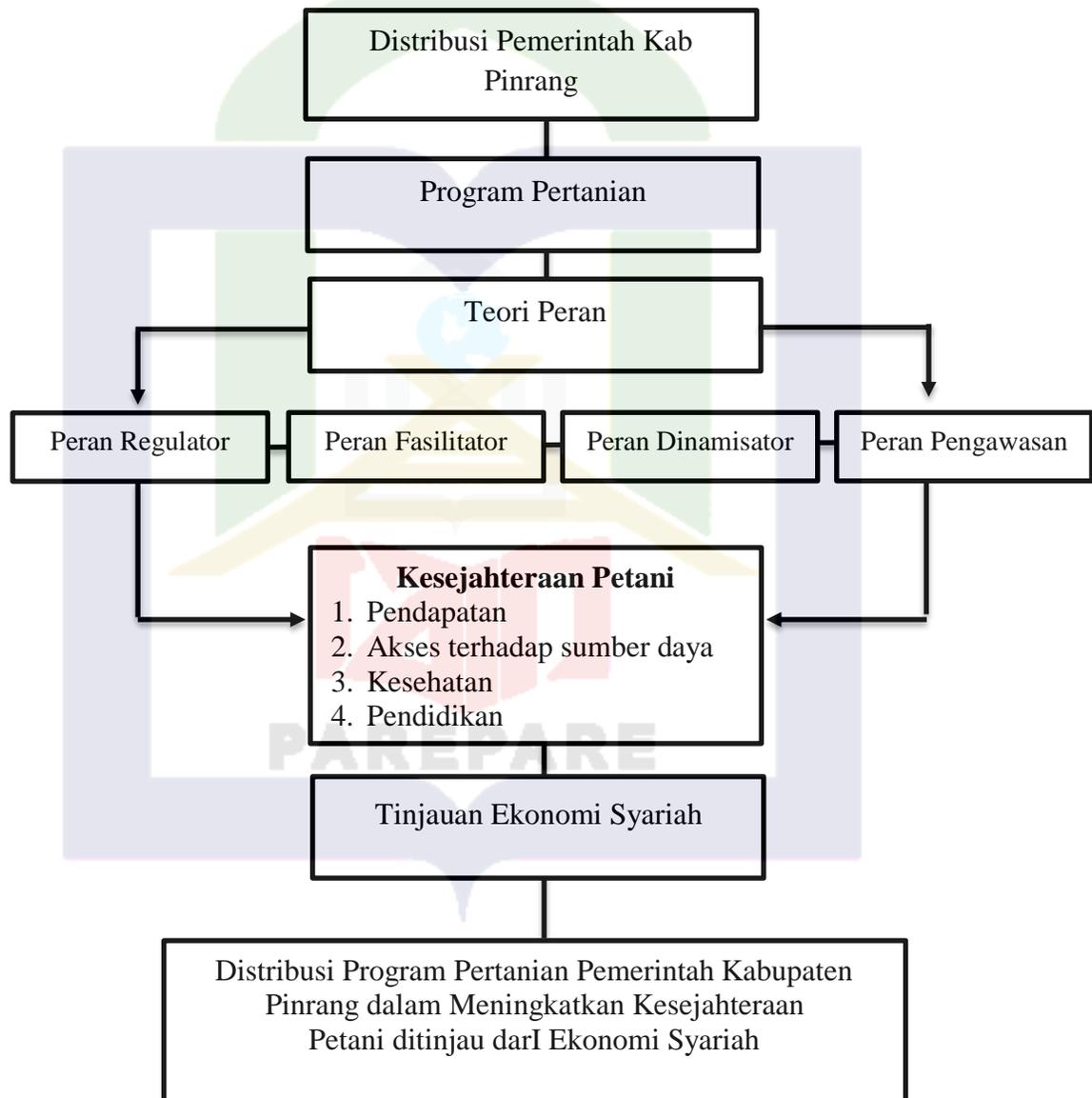
i. Ma'ad

Keyakinan terhadap hari kiamat dan kehidupan setelah kematian (ma'ad) menegaskan pentingnya mencari kebaikan dan amal yang baik di dunia. Dalam konteks distribusi program pertanian, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan kebaikan yang akan membawa keberkahan di dunia dan di akhirat.⁶⁸

⁶⁸ Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, h.94

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu bagian dari bagaimana pemikiran penelitian terhadap suatu konsep terkait dengan judul Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani ditinjau dari Ekonomi Syariah.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini membahas hal-hal yang ada tentang Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani ditinjau dari Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yakni data yang dikumpulkan berasal dari lapangan. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan dan memperoleh pemahaman sesuai realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dikaji.⁶⁹

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa, sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yakni peneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diamati, pendekatan ini diarahkan

⁶⁹Moh Nazir, 'Metode Penelitian Cetakan Kelima', (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023). h.90

pada latar dan individu secara holistik atau utuh sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pemahaman petani serta pihak terkait terhadap program pertanian yang diterapkan oleh pemerintah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Masyarakat Petani Pinrang dan lembaga-lembaga yang berwenang

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu 1 bulan lamanya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis distribusi program pertanian pemerintah Kabupaten Pinrang dimana tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana pemerintah Kabupaten Pinrang mendistribusikan program-program pertanian kepada petani, termasuk kebijakan, regulasi, dan praktik distribusi yang diterapkan.
2. Mengidentifikasi peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengidentifikasi peran konkret yang dimainkan oleh distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di

Kabupaten Pinrang, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan pendapatan.

3. Menganalisis perspektif ekonomi syariah terhadap peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan pembagian yang merata.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer Lofland, sumber data dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan informasi dari subjek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Pertanian, Petani dan Masyarakat.

2. Data sekunder

Sugiyono mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari literature, artikel, jurnal dan situs internet yang berkenan dan memperkuat data primer yang ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.⁷⁰ Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara peneliti melibatkan diri dari pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dan dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung kepada Dinas Pertanian, Petani dan Masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan Dinas Pertanian, Petani dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁷¹ Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang

⁷⁰Narbuko Cholid and Abu Achmadi, 'Metode Penelitian, Cet V' (Bandung: Bumi Aksara, 2021). H.89

⁷¹M Iqbal Hasan, 'Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya' (Jakarta, 2022).h.89

dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, yang mana analisis data kualitatif ini bersifat induktif.

Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi Data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengalaman dan mempermudah penelitian untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian (Data Display)

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, baga. Dengan mendisplaykan data, maka

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

4. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan data penelitian kualitatif mungkin akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan dan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek tertentu yang sebelumnya belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi pasti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merujuk pada fokus penelitian yaitu distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang, dalam pengumpulan data penelitian, beberapa tahapan dilakukan yaitu tahapan observasi. Tahapan ini meliputi pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan wawancara dimana dalam penelitian ini beberapa pihak yang diwawancarai yaitu dinas pertanian, pemerintah setempat dan kelompok tani. Berikut hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada fokus penelitian pertama yaitu berkaitan dengan distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang. Beberapa pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan distribusi pemerintah dalam bidang pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani di Indonesia termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menyatakan bahwa petani perlu mendapat perlindungan secara optimal dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan dalam : Memperoleh sarana dan prasarana produksi , kepastian usaha, resiko harga, kegagalan Panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Sedangkan aturan dasar yang menjelaskan terkait dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 67 Tahun 2021 mengatur tentang pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian. Peraturan ini mencakup koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Pendistribusian bahan pertanian diatur melalui

beberapa kebijakan dan program yang bertujuan memastikan ketersediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian secara tepat sasaran.

Pemerintah bertugas untuk menetapkan aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur distribusi sarana produksi pertanian di Kabupaten Pinrang. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 yang menekankan perlindungan dan pemberdayaan petani. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 67 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, adalah contoh implementasi regulasi yang memberikan landasan hukum untuk distribusi bahan pertanian. Pemerintah mengatur prosedur distribusi agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani, memberikan perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi, seperti kegagalan panen dan perubahan iklim.

Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung distribusi di sektor pertanian. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi distribusi bibit tanaman, pupuk, dan alat pertanian. Pemerintah juga menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan sistem distribusi yang memudahkan petani dalam memperoleh bahan produksi. Ini juga melibatkan penyediaan pelatihan kepada petani dan pemberian subsidi untuk mengurangi beban biaya produksi, yang semuanya bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian ke pasar.

Pemerintah berfungsi sebagai dinamisator dengan mendorong dan memotivasi berbagai pihak untuk aktif terlibat dalam proses distribusi. Program-program pemberdayaan petani yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong petani agar lebih produktif dan berpartisipasi dalam program distribusi pertanian yang lebih luas. Ini termasuk program pemberian bibit unggul dan teknologi pertanian

modern yang dapat meningkatkan hasil pertanian, serta memberi kesempatan bagi petani untuk memanfaatkan pasar lebih efektif.

Sebagai pengawas, pemerintah bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi proses distribusi secara berkesinambungan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi bahan pertanian berjalan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang terjadi, seperti ketidaksesuaian distribusi atau penyelewengan bantuan yang dapat merugikan petani.

Berdasarkan Penjelasan alur dideskripsikan sebagaimana yang dilakukan selama ini dalam upaya distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data penelitian berikut jenis pendistribusian dinilai dari aspek distribusi bantuan dan distribusi subsidi:

Tabel 4.1 Data Pendistribusian Produk Pertanian

No	Produk Pertanian	Kategori Pendistribusian
1	Benih Unggul	Bantuan
2	Pupuk Bersubsidi	Subsidi
3	Pestisida	Bantuan
4	Alat Pertanian	Bantuan
5	Kredit Pertanian	Subsidi

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data hasil penelitian dijelaskan diatas bahwa:

1. Benih Unggul

a. Jagung

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal benih unggul yang dilakukan khususnya pada jagung. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau proses pendistribusian jagung itu kita diberikan memang bibit dan sejauh ini kalau bibit jagung itu di lakukan lewat desa. Kalau misalnya kita disini memang dominan jagung karena bibit kita itu kalau jagung banyak merek. Jadi ada yang memang murah ada juga yang cukup mahal itu tergantung jenis jagungnya lagi. Kalau dari pemerintah itu palingan subsidi saja sama pemeliharaan seperti perawatan lahan itu biasanya dilakukan. Kalau bibit jagung itu subsidi harga yang pernah ada.⁷²

Hasil wawancara mengenai proses pendistribusian benih jagung menunjukkan bahwa benih jagung biasanya didistribusikan melalui desa. Di kecamatan duampanua jagung merupakan komoditas dominan dengan berbagai merek benih yang tersedia. Harga benih bervariasi, dengan beberapa merek yang lebih murah dan lainnya yang lebih mahal, tergantung pada jenis jagungnya. Pemerintah berperan dalam memberikan subsidi harga benih serta membantu pemeliharaan lahan, termasuk perawatan yang diperlukan. Subsidi harga benih yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya telah membantu petani dalam memperoleh benih berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Berdasarkan data penelitian dari informan bahwa Benih Jagung Hibrida Asia dengan harga Rp210.000 per kilogram merupakan salah satu jenis benih unggul yang banyak dicari oleh petani dimana informan menjelaskan bahwa benih ini terkenal dengan kualitasnya yang mampu menghasilkan tanaman jagung dengan produktivitas tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi

⁷² Bapak Andis, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

lingkungan. Sedangkan Benih Jagung Hibrida Super ACI yang dijual dalam kemasan 5 kg dengan harga sekitar Rp70.000.

b. Padi

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal benih unggul yang dilakukan khususnya pada padi. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Bibit Pagi itu kalau di kecamatan ini ada yang diberikan bantuan bibit tapi terbatas jumlahnya. Bagus selama ini yang kita ajukan atau rekomendasikan itu yang datang. Menurut saya bagus pendistribusiannya kalau bibit padi karena memang jumlahnya kalau kita disini masih belum banyak dibandingkan dengan jagung itu.⁷³

Hasil wawancara mengenai pendistribusian bibit padi di kecamatan duampanua menunjukkan bahwa bantuan bibit padi memang diberikan, namun dalam jumlah yang terbatas. Responden menganggap bahwa proses pendistribusian bibit padi berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jumlah pendistribusian bibit Padi yaitu sebanyak 40-50 Kilogram benih padi untuk 1 hektarnya. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa bibit yang diajukan atau direkomendasikan selalu datang. Meskipun demikian, jumlah bibit padi yang didistribusikan masih belum sebanyak bibit jagung. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas atau kebutuhan antara komoditas padi dan jagung di wilayah tersebut.

⁷³ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

c. Pisang

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal benih unggul yang dilakukan khususnya pada pisang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau misalnya pisang itu ada beberapa tapi tidak banyak, karena itu kalau kita disini memang dominan dijagung selama ini. Tapi kalau pisang itu lebih ke bibit unggul memang kalau kita disini ada beberapa itu petani pisang yang memang selalu diberikan bibit unggul dari pemerintah.⁷⁴

Hasil wawancara mengenai pendistribusian bibit pisang menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa petani yang menerima bibit pisang, jumlahnya tidak banyak karena jagung merupakan komoditas yang dominan di daerah kecamatan Duampanua. Bibit pisang yang diberikan adalah bibit unggul dan disalurkan oleh pemerintah sejumlah 500 – 1000 pohon. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mendukung para petani pisang dengan menyediakan bibit berkualitas tinggi, meskipun fokus utama pendistribusian benih di daerah tersebut lebih condong pada jagung.

d. Pepaya

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal benih unggul yang dilakukan khususnya pada pepaya. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pepaya itu tidak terlalu banyak kalau disini karena kalau disini kan jagung yang paling banyak. Tapi setau saya itu kalau bibit pepaya tadi mau sama dengan pisang, tapi lebih tinggi perhatiannya ke pisang. Kalau bibit pepaya itu selama ini selalu diberikan seperti kaya percobaan bibit bibit unggul dari pemerintah. Biasanya diberikan bantuan bibit dan juga biasanya di berikan seperti halnya bibit lain.⁷⁵

⁷⁴ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

⁷⁵ Bapak Ridwan, *Petani Kecamatan Duampanua*,. Wawancara 20 Juli 2024

Hasil wawancara mengenai pendistribusian bibit pepaya menunjukkan bahwa penanaman pepaya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jagung, yang merupakan komoditas utama. Menurut responden, perhatian pemerintah terhadap bibit pepaya mirip dengan pisang, meskipun perhatian lebih besar diberikan pada bibit pisang. Bibit pepaya yang diberikan oleh pemerintah biasanya merupakan bibit unggul yang masih dalam tahap percobaan sebanyak 400-800 pohon di wilayah khusus di Desa Bababinangan. Pemerintah juga memberikan bantuan bibit pepaya, sama seperti bantuan yang diberikan untuk bibit tanaman lainnya. Peranan tersebut menunjukkan adanya usaha pemerintah untuk memperkenalkan dan mengembangkan penanaman pepaya melalui pemberian bibit unggul kepada petani.

2. Pupuk Bersubsidi

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal pupuk bersubsidi yang dilakukan khususnya pada Kab. Pinrang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Untuk pupuk bersubsidi itu memang sekarang itu bantuan yang sangat efektif menurut saya. Selama ini pendistribusiannya itu jelas dan tepat waktu kalau beberapa waktu lalu ini. Selama ini memang diusahakan katanya dari pemerintah untuk tepat waktu. Disisi lain juga itu kalau pupuk bersubsidi dilakukan itu bertahap tapi selalu efektif sampai di petani tepat waktu.⁷⁶

Hasil wawancara mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa bantuan ini dianggap sangat efektif oleh responden.

⁷⁶ Bapak Ridwan, *Petani Kecamatan Duampanua*,. Wawancara 20 Juli 2024

Pendistribusiannya selama ini berjalan dengan jelas dan tepat waktu, sesuai dengan upaya pemerintah untuk memastikan ketepatan waktu distribusi. Meskipun pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan secara bertahap, efektivitasnya tetap terjaga, dan pupuk selalu sampai ke petani tepat waktu.

Adapun besaran subsidi Pupuk yaitu sebesar 40-60% dari harga asli pupuk normal pada umumnya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani melalui penyediaan pupuk bersubsidi yang vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

3. Pestisida

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal perstisida yang dilakukan khususnya pada Kab. Pinrang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pestisida itu juga ada bantuannya dari pemerintah, dalam bentuk bantuan sama subsidi harga pestisida juga ada.⁷⁷

Hasil wawancara mengenai pendistribusian pestisida menunjukkan bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pestisida kepada petani. Selain itu, terdapat juga subsidi harga pestisida yang diberikan oleh pemerintah berkisar yaitu 50% dari harga aslinya bahkan di beberapa tempat pestisida di distribusikan secara gratis kepada petani. Bantuan dan subsidi ini bertujuan untuk mendukung petani dalam mengendalikan hama dan penyakit

⁷⁷ Bapak Andis, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kualitas produk.

4. Alat pertanian

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal alat pertanian yang dilakukan khususnya pada Kab. Pinrang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Sampai sekarang itu kalau alat pertanian dibagikan itu kalau tidak salah perkelompok tani atau juga kalau tidak salah itu ada yang perdesa. Jadi selama ini pemberian bantuan itu alat pertanian seperti dompok atau traktor ituyah. Biasanya juga memang kita tidak lagi sewa. Tapi kita gentian pakainya. Cuman kalau tergantung lagi dari kondisinya bagaimana.⁷⁸

Hasil wawancara mengenai distribusi alat pertanian menunjukkan bahwa hingga saat ini, alat-alat pertanian seperti dompok atau traktor biasanya dibagikan kepada kelompok tani atau desa-desa, tercatat bahwa desa bababinangan mendapatkan 2 traktor yang digunakan kepada kelompok tani. Bantuan ini memungkinkan para petani untuk menggunakan alat-alat tersebut tanpa harus menyewa, dengan penggunaan bergiliran di antara anggota kelompok atau desa.

5. Kredit Pertanian

Hasil penelitian terkait dengan bagaimana proses pendistribusian dalam hal kredit pertanian yang dilakukan khususnya pada Kab. Pinrang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

⁷⁸ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

Kredit pertanian itu ada, tapi kalau bantuan dengan pemerintah itu dulu pernah ada dan saya kira sekarang itu lebih kepada pinjaman itu caranya dari pemerintah kemudian kepengusaha. Pinjamannya itu kalau tidak salah dia waktunya perpanen. Jadi setiap orang yang sudah panen itu diupayakan mereka melunasi pinjamannya.⁷⁹

Hasil wawancara mengenai proses pendistribusian kredit pertanian di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa kredit pertanian memang ada, namun sistemnya telah mengalami perubahan dimana bantuan dari pemerintah lebih berfokus pada pinjaman yang diberikan kepada para pengusaha pertanian. Pinjaman ini umumnya diberikan dengan ketentuan bahwa pelunasannya dilakukan setelah masa panen.

Berdasarkan penjelasan data diatas diketahui bahwa terdapat 5 tahapan proses pendistribusian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:

a. Identifikasi Kebutuhan

Distribusi pemerintah yang dilakukan pada tahapan pertama yaitu identifikasi kebutuhan, Proses ini sangat krusial karena menentukan jenis bantuan atau subsidi yang akan diberikan kepada petani di Kabupaten Pinrang. Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui berbagai metode untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam hasil penelitian yang merujuk pada identifikasi kebutuhan. Pertanyaan terkait dengan bagaimana distribusi yang dilakukan pemerintah terhadap produk produk pertanian, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau selama ini itu sudah bertahun tahun kita pakai mekanisme distribusi secara langsung ke kelompok tadi, jdi sistemx itu sistem pengajuan dan analisis

⁷⁹ Bapak Andis, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

kebutuhan, artinya itu distribusi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari kelompok tani. kalau produk pertanian ini seperti benih dan pupuk itu paling utama. jadi sistem dan mekanisme distribusinya itu bertahap untuk setiap wilayahnya. sektor pemerintah yang berperan itu dinas pertanian. pasokan pupuk itu juga berbeda. dan subsidi pupuk itu yang di harapkan. tpi selama ini distribusi produk pertanian itu selalu lambat dari jadwal yang direncanakan atau yang dijanjikan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa mekanisme distribusi yang telah berlangsung bertahun-tahun ini secara langsung ditujukan kepada kelompok petani, dengan sistem pengajuan dan kebutuhan yang menjadi dasar utama. Hal ini memastikan bahwa bantuan berupa benih dan pupuk disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi di lapangan, dengan pengaturan yang dilakukan bertahap untuk setiap wilayahnya. Meskipun demikian hasil wawancara menjelaskan bahwa terdapat catatan mengenai keterlambatan dalam distribusi produk pertanian, yang sering kali tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan atau dijanjikan sebelumnya. Peran Dinas Pertanian sangat krusial sebagai sektor pemerintah yang bertanggung jawab atas distribusi dan subsidi pupuk yang merupakan harapan utama dalam mendukung keberhasilan petani di Kabupaten Pinrang khususnya pada daerah wilayah Kecamatan Duampanua. Kutipan wawancara dengan dinas pertanian juga menjelaskan bahwa:

Kalau sistemnya itu ada namanya pengajuan. Dan itu dilakukan dari kelompok taninya, jadi kelompok tani yang merekomendasikan berapa dan apa saja kebutuhan yang dialokasikan khususnya seperti jumlah kebutuhan subsidi

⁸⁰ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

pupuk dan juga alat teknologi seperti traktor ataupun sekarang banyak alat yang di sewakan dan itu juga bekerjasama dengan pemerintah.⁸¹

Berdasarkan kutipan wawancara bahwa sistem distribusi bantuan diatur melalui proses pengajuan yang diajukan langsung oleh kelompok tani. Kelompok tani memiliki peran aktif dalam merekomendasikan jumlah dan jenis kebutuhan yang mereka perlukan, termasuk subsidi pupuk dan teknologi pertanian seperti sewa traktor atau alat-alat lainnya. Kolaborasi antara kelompok tani dan pemerintah dalam hal ini menjadi kunci, dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Pinrang.

Adapun hasil wawancara dengan kelompok tani bahwa:

Kalau selama ini itu yang kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan dulu, jadi kita berdiskusi dengan para petani berapa jumlah kebutuhan yang diinginkan. Nantinya itu yang kemudian diajukan ke pihak dinas pertanian melalui perwakilan tani.⁸²

Hasil wawancara dengan kelompok tani mendeskripsikan bahwa proses identifikasi kebutuhan sebagai langkah awal dalam distribusi bantuan pertanian. Menurut informan proses ini dimulai dengan berdiskusi langsung untuk menentukan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh para petani. Diskusi ini melibatkan partisipasi aktif dari para petani untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka secara

⁸¹ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

⁸² Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

spesifik. Setelah kebutuhan teridentifikasi, mereka kemudian mengajukan permohonan bantuan kepada pihak Dinas Pertanian melalui perwakilan kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi antara pihak petani dan pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan di lapangan, sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara juga dijelaskan oleh pemerintah desa bahwa:

Serlama ini kita lakukan dulu musyawarah dengan kebutuhan dan identifikasi kebutuhan apa yang akan diajukan sebagai pengajuan ke dinas pertanian kabupaten.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa dalam proses distribusi bantuan pertanian dimulai dengan melakukan musyawarah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang akan diajukan sebagai pengajuan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Musyawarah ini menjadi forum untuk membahas dan menentukan secara kolektif kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan penting oleh masyarakat petani di tingkat desa khususnya kecamatan duampanua tersebut. Setelah kebutuhan teridentifikasi, pemerintah desa kemudian mengajukan permohonan bantuan tersebut kepada instansi Dinas Pertanian Kabupaten.

Pendekatan yang dilakuakn oleh informan dalam hasil wawancara tersebut menekankan partisipasi aktif dari pemerintah desa dalam mengadvokasi kepentingan

⁸³ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

petani di wilayah mereka, serta memastikan bahwa bantuan yang diterima dapat mengkomodasi kebutuhan yang sebenarnya dirasakan di tingkat masyarakat desa.

Pertanyaan terkait dengan bagaimana distribusi dilakukan pemerintah terhadap produk teknologi pertanian, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau produk teknologi itu didistribusikan tidak setiap daerah, kalau teknologi pertanian itu di berikan berdasarkan tingkat kebutuhan suatu daerah, artinya produk teknologi ini kan diupayakan untuk semua daerah itu memiliki produk teknologi yang sama atau setara supaya tidak ada kesenjangan itu, jadi pendistribusiannya itu melalui dinas pertanian kemudian ke Pihak Desa dan kelompok dltani secara langsung.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa distribusi produk teknologi pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan di setiap daerah. Produk-produk teknologi ini tidak didistribusikan secara merata ke setiap daerah, melainkan berdasarkan analisis kebutuhan khusus masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang sama atau setara terhadap produk teknologi pertanian, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pengembangan pertanian antar daerah. Proses distribusi yang dilakukan melibatkan peran penting dari Dinas Pertanian, yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan distribusi ke pemerintah desa dan langsung kepada kelompok tani.

Penjelasan tersebut mencerminkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan teknologi pertanian, sesuai dengan kebutuhan spesifik yang teridentifikasi di lapangan. Penjelasan tersebut mendukung efisiensi dan efektivitas dalam

⁸⁴ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pinrang. Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa:

Kalau soal pertanian itu tidak setiap daerah diberikan bantuan secara bersamaan, jadi memang ada jatahnya sesuai permintaan dan kebutuhan yang dipertimbangkan.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa distribusi bantuan untuk pertanian tidak dilakukan secara bersamaan di setiap daerah. Proses lebih didasarkan pada alokasi yang mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan yang spesifik dari masing-masing daerah. Artinya, setiap daerah mendapatkan bantuan atau subsidi pertanian berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan yang telah diajukan atau teridentifikasi. Strategi untuk mengoptimalkan efektivitas penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak maksimal sesuai dengan kondisi dan prioritas setempat.

Hasil wawancara tersebut menjabarkan bahwa distribusi tidak hanya ditujukan untuk meratakan pelayanan, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan dinamika dan karakteristik unik dari setiap daerah dalam konteks pertanian di Kabupaten Pinrang. Pertanyaan terkait dengan bagaimana distribusi pemerintah terhadap Kebutuhan pasar pertanian, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pendistribusian dengan produk pasar itu saya kira seperti halnya produk pertanian yah, jadi produk pertanian itu yang dihasil kan untuk bisa menjangkau pasar. selama ini kita menyediakan bazar dan pasar tradisional untuk dapat

⁸⁵ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

menampjng hasil pertanian dari petani. bazar pasar murah itu juga perlu dilakukan dalam skala kecamatan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pendistribusian pemerintah terhadap kebutuhan pasar pertanian dilakukan dengan beberapa strategi yang telah disepakati. Produk-produk pertanian diarahkan untuk mencapai pasar, dengan pendekatan distribusi bantuan pertanian. Pemerintah mengorganisir bazar dan pasar tradisional sebagai platform untuk memasarkan hasil pertanian dari para petani. Kegiatan seperti bazar dan pasar murah juga diadakan dalam skala kecamatan, dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas hasil pertanian ke pasar lokal dan memastikan bahwa petani dapat meraih keuntungan secara efisien. Informan juga menjelaskan bahwa:

Persoalan pasar itu juga selalu menjadi problematika sebenarnya. Seperti halnya ini kalau hasil pertanian itu ada sekarang memang dari petani tidak lagi ke pasar tapi diambil oleh pedagang jadi sebenarnya aspek pertanian dalam pasar itu tidak terlalu berdampak.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan informan bahwa persoalan pasar merupakan masalah yang signifikan dalam pertanian. Dikemukakan bahwa hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani tidak selalu langsung mencapai pasar, melainkan sering diambil oleh pedagang atau perantara. Hal ini menunjukkan bahwa peran langsung pertanian dalam pasar tidak selalu berfokus pada pasar.

⁸⁶ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

⁸⁷ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

b. Perencanaan dan Koordinasi

Hasil penelitian kedua mengenai alur distribusi produk pertanian yaitu perencanaan dan koordinasi, dalam kutipan hasil wawancara dijelaskan bahwa bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam proses distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Tahapan perencanaan itu tadi seperti halnya tahapan identifikasi, jadi kelompok tani lagi lagi menjadi penentu disini, kita sebagai dinas terkait hanya mengambil rencana dan list dari jumlah kebutuhan yang ada. Dan kemudian nantinya kita alokasikan perencanaan apa yang bisa di realisasikan dan yang mana tidak bisa direalisasikan. Soal realisasi itu ada pertimbangannya.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam proses perencanaan distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan, di mana kelompok tani memiliki peran kunci dalam menentukan kebutuhan yang dibutuhkan. Dinas Dinas Pertanian bertindak sebagai fasilitator yang mengambil rencana dan daftar kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa setelah kebutuhan teridentifikasi, dilakukan alokasi perencanaan untuk menentukan apa yang dapat direalisasikan dan apa yang tidak bisa direalisasikan. Proses ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya, anggaran, serta prioritas dan kepentingan yang telah disepakati. Dengan demikian, perencanaan distribusi produk pertanian tidak hanya mengikuti kebutuhan yang diajukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek

⁸⁸ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

realisasi yang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan bantuan dan subsidi bagi petani di Kabupaten Pinrang. Informan juga menjelaskan bahwa:

Kita mengajukan list kebutuhan dan keinginan ke pihak dinas pertanian, seperti misalnya jumlah pupuk subsidi dan jenis pupuk yang kita rekomendasikan, tapi itu juga sudah ada list pupuk yang akan di distribusikan sebenarnya. Selanjutnya itu juga ada yang namanya realisasi perencanaan. Jadi seperti halnya apa yang kita rencanakan tidak selalu itu yang akan direalisasikan.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan informan bahwa dalam proses pengajuan kebutuhan kepada Dinas Pertanian melibatkan penyusunan list yang mencakup jumlah dan jenis pupuk subsidi yang direkomendasikan oleh kelompok tani. Namun, dalam praktiknya, sudah ada daftar atau list pupuk yang telah direncanakan untuk didistribusikan. Proses selanjutnya mencakup realisasi perencanaan, di mana apa yang direncanakan oleh kelompok tani tidak selalu dapat direalisasikan sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok tani memiliki peran dalam mengajukan kebutuhan mereka, ada pertimbangan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian terkait dengan ketersediaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi rencana. Faktor-faktor seperti anggaran, ketersediaan stok, dan kondisi lapangan dapat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi semua permintaan yang diajukan.

c. Pengadaan Barang

Hasil penelitian merujuk pada pengadaan barang. Dalam penelitian ini pengadaan barang dilakukan oleh dinas pertanian setelah mendapatkan alokasi

⁸⁹ Bapak Ridwan, *Petani Kecamatan Duampanua*,. Wawancara 20 Juli 2024

anggaran dan menyetujui realisasi perencanaan sebelumnya. Berikut pertanyaan yang diajukan bahwa bagaimana proses pengadaan barang yang dilakukan dalam proses distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Persoalan pengadaan barang itu selalau kita koordinasi dengan semua pihak, seperti halnya pihak pemerintah desa setempat. Penyaluran barang juga itu bertahap memang dilakuakn seperti tahapan pertama itu kita distribusikan pupuk terlebih dahulu nnti di bulan atau tahapan selanjutnya baru misalnya pestisida dan lain lain.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam proses pengadaan barang dalam distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa setempat. Setelah alokasi anggaran disetujui dan realisasi perencanaan dilakukan, Dinas Pertanian melakukan pengadaan barang sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Proses pengadaan dilakukan secara bertahap di mana barang-barang seperti pupuk didistribusikan terlebih dahulu, kemudian di tahapan berikutnya dapat dilanjutkan dengan barang seperti pestisida dan produk lainnya. Pendekatan bertahap ini dirancang untuk memastikan bahwa distribusi barang dapat dilakukan secara teratur dan efisien, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah diidentifikasi di lapangan.

Hasil wawancara juga dijelaskan bahwa:

Pengadaan barang di Dinas Pertanian dimulai setelah kami menerima alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Pertama-tama, kami meninjau kembali

⁹⁰ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

perencanaan yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan petani telah tercakup. Setelah itu, kami membuat daftar spesifikasi barang yang akan diadakan, seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan barang di Dinas Pertanian dimulai setelah menerima alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Tahapan awal melibatkan peninjauan kembali perencanaan yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan petani telah tercakup dengan baik. Dalam proses ini pihak Dinas Pertanian memastikan bahwa rencana distribusi yang telah disetujui dapat diimplementasikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan prioritas yang telah ditetapkan. Informan lainnya menjelaskan bahwa:

Kalau soal pengadaan barang itu kami menandatangani kontrak pengadaan dengan beberapa pihak penyedia barang seperti pabrik-pabrik besar. Kontrak ini mencakup rincian spesifikasi barang, jumlah, harga, serta jadwal pengiriman. Kami juga menetapkan titik pengiriman, yang biasanya adalah gudang penyimpanan kami di Dinas Pertanian atau tempat lainnya.⁹²

Berdasarkan penjelasan informan bahwa dalam proses pengadaan barang di Dinas Pertanian, mereka melakukan penandatanganan kontrak pengadaan dengan beberapa pihak penyedia barang, seperti pabrik-pabrik besar. Kontrak ini mencakup rincian yang penting seperti spesifikasi barang yang diinginkan, jumlah barang yang akan dibeli, harga per unit, serta jadwal pengiriman yang harus dipatuhi.

⁹¹ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

⁹² Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

d. Penyaluran Produk

Tahapan selanjutnya yaitu berkaitan dengan penyaluran produk, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses penyaluran produk pertanian dilakukan oleh dinas pertanian melalui beberapa tahapan yaitu penyaluran secara langsung ke petani dan penyaluran secara tidak langsung ke pihak pemerintah desa. Bagaimana proses penyaluran barang yang dilakukan dalam proses distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Penyaluran produk secara langsung ke petani dimulai dengan pendaftaran petani yang membutuhkan bantuan. Petani bisa mendaftar melalui kelompok tani atau langsung ke Dinas Pertanian. Setelah itu, kami melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria penerima bantuan. Produk pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pertanian kemudian disalurkan langsung ke petani. Kami mengatur jadwal distribusi dan memastikan barang dikirim tepat waktu ke lokasi petani.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa proses penyaluran barang dalam distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang dilakukan dengan beberapa tahapan yang terstruktur. Penyaluran produk pertanian secara langsung ke petani dimulai dengan proses pendaftaran dimana petani yang membutuhkan bantuan dapat mendaftar melalui kelompok tani atau langsung ke Dinas Pertanian. Setelah pendaftaran, dilakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa petani tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa setelah verifikasi selesai barang-barang pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pertanian disalurkan langsung ke petani sesuai dengan kebutuhan yang tercatat. Dalam proses tersebut bahwa Dinas Pertanian

⁹³ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

mengatur jadwal distribusi dan memastikan bahwa barang-barang tersebut dikirim tepat waktu ke lokasi petani yang telah terdaftar.

Informan kembali menjelaskan bahwa:

Kami bekerja sama dengan kelompok tani untuk memudahkan distribusi. Kelompok tani berperan penting dalam memverifikasi dan mendata anggotanya. Selain itu, kami juga memiliki petugas lapangan yang mengawasi dan memastikan bahwa produk sampai ke petani yang berhak. Jika ada masalah atau kendala, kami segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar distribusi tidak terhambat.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kerja sama dengan kelompok tani merupakan suatu peran krusial dalam memfasilitasi distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang. Kelompok tani tidak hanya membantu dalam memverifikasi dan mendata anggotanya yang membutuhkan bantuan, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara petani dengan Dinas Pertanian. Selain itu, adanya petugas lapangan yang ditugaskan untuk mengawasi proses distribusi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa produk pertanian sampai tepat waktu dan kepada petani yang berhak menerimanya.

Petugas lapangan yang dimaksudkan informan bahwa bertanggung jawab untuk memonitor jalannya distribusi serta untuk mengatasi masalah atau kendala yang mungkin timbul selama proses distribusi. Koordinasi yang cepat dan efektif antara berbagai pihak terlibat, termasuk kelompok tani, petugas lapangan, dan Dinas Pertanian, menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi produk pertanian.

⁹⁴ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

Penjelasan hasil wawancara tersebut bahwa komitmen dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam proses distribusi berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan di Kabupaten Pinrang.

Informan juga menjelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

Penyaluran melalui pemerintah desa dilakukan untuk menjangkau petani di daerah-daerah yang sulit dijangkau langsung oleh Dinas Pertanian. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendata petani yang membutuhkan bantuan. Produk pertanian kemudian disalurkan ke kantor desa, dan dari sana, pemerintah desa mendistribusikan produk tersebut kepada petani setempat.⁹⁵

Hasil wawancara menjelaskan bahwa penyaluran produk pertanian melalui pemerintah desa menjadi strategi penting untuk menjangkau petani di daerah-daerah yang sulit dijangkau langsung oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi antara Dinas Pertanian dan pemerintah desa memungkinkan proses distribusi menjadi lebih efisien dan menyeluruh. Proses dimulai dengan pendataan petani yang membutuhkan bantuan oleh pemerintah desa. Data ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Setelah pendataan selesai, produk pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pertanian didistribusikan ke kantor desa sebagai titik distribusi utama.

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk tersebut kepada petani setempat sesuai dengan daftar yang telah disusun.

⁹⁵ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

Informan juga menjelaskan bahwa:

Pemerintah desa berperan sebagai perantara antara Dinas Pertanian dan petani. Mereka membantu dalam pendataan, verifikasi, dan penyaluran produk. Pemerintah desa juga bertanggung jawab memastikan bahwa bantuan yang diterima benar-benar sampai kepada petani yang berhak. Mereka melakukan pemantauan dan melaporkan kembali kepada kami mengenai distribusi yang telah dilakukan.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan informan bahwa peran pemerintah desa dalam distribusi produk pertanian menjadi sangat penting sebagai perantara antara Dinas Pertanian dan petani di Kabupaten Pinrang. Pemerintah desa tidak hanya membantu dalam proses pendataan petani yang membutuhkan bantuan, tetapi juga melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah desa bertanggung jawab langsung dalam penyaluran produk pertanian kepada petani. Mereka menjalankan fungsi sebagai titik distribusi utama di tingkat lokal, memastikan bahwa produk seperti benih, pupuk, dan alat pertanian sampai tepat waktu kepada petani yang membutuhkan.

e. Pengawasan dan Evaluasi

Bagaimana proses pengawasan barang yang dilakukan dalam proses distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pertanyaan terkait dengan bagaimana distribusi dilakukan di Desa dan Perkotaan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pengawasan distribusi barang di desa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kelompok tani, dan petugas lapangan dari Dinas Pertanian. Kami memiliki tim pengawas yang rutin melakukan kunjungan ke desa-desa untuk memantau distribusi barang. Mereka memeriksa apakah

⁹⁶ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepala Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

barang yang disalurkan sesuai dengan data dan kebutuhan petani. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendapatkan laporan distribusi secara berkala.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa proses pengawasan distribusi barang dalam distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa, kelompok tani, dan petugas lapangan dari Dinas Pertanian. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa distribusi barang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa memainkan peran penting dalam pengawasan distribusi di tingkat lokal. Mereka secara aktif terlibat dalam memantau dan mengontrol penyaluran barang pertanian ke petani di desa-desa. Penjelasan tersebut mendeskripsikan bahwa petani penerima bantuan dan memastikan bahwa barang yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang telah tercatat.

Informan juga menjelaskan bahwa:

Kalau selama ini. Mekanisme pelaporan yang ketat. Pemerintah desa dan kelompok tani harus mengisi laporan distribusi yang mencakup jumlah barang yang diterima, jumlah yang disalurkan, dan penerima bantuan. Laporan ini kemudian dikirimkan ke Dinas Pertanian untuk dievaluasi. Selain itu, kami juga mengadakan pertemuan rutin dengan pemerintah desa untuk membahas proses distribusi yang efektif.⁹⁸

Hasil wawancara menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang diatur dengan ketat untuk memastikan transparansi

⁹⁷ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

⁹⁸ Bapak Muh. Taiyeb, *Kepada Desa*. Wawancara 20 Juli 2024

dan akurasi dalam pengelolaan distribusi. Proses pelaporan ini melibatkan pemerintah desa dan kelompok tani sebagai pihak yang terlibat langsung dalam distribusi barang. Pemerintah desa dan kelompok tani bertanggung jawab untuk mengisi laporan distribusi yang mencakup beberapa informasi kunci, seperti jumlah barang yang diterima dari Dinas Pertanian, jumlah yang telah disalurkan kepada petani, serta detail penerima bantuan.

Laporan tidak hanya mencatat jumlah barang fisik yang didistribusikan, tetapi juga mencatat detail tentang bagaimana barang tersebut digunakan atau dialokasikan di tingkat lokal. Setelah laporan tersebut terisi lengkap, mereka dikirimkan kembali kepada Dinas Pertanian untuk dievaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi barang sesuai dengan rencana dan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.

Pertanyaan terkait dengan apakah seluruh pendistribusian yang dilakukan efektif dirasakan oleh Petani, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami di Dinas Pertanian selalu berusaha keras untuk memastikan pendistribusian pupuk dan benih dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan petani. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada tantangan terkait keterlambatan dalam beberapa kasus, terutama saat musim tanam yang padat.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa Dinas Pertanian menjaga efektivitas pendistribusian pupuk dan benih kepada petani di Kabupaten Pinrang. Mereka mengakui bahwa meskipun upaya keras telah dilakukan, masih terdapat

⁹⁹ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

tantangan tertentu yang mengakibatkan keterlambatan dalam beberapa kasus, terutama saat musim tanam yang padat.

Komitmen Dinas Pertanian untuk memastikan pendistribusian tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan petani tercermin dari strategi mereka dalam mengelola distribusi. Meskipun terdapat tantangan seperti jadwal yang padat selama musim tanam, mereka terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan keterlambatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka produk seperti pupuk dan benih sampai tepat waktu kepada petani adalah untuk mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian yang senantiasa berusaha untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem distribusi mereka, termasuk melakukan evaluasi rutin dan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa dan kelompok tani, untuk meningkatkan efektivitas dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Informan juga menjelaskan bahwa:

Pendistribusian pupuk dari dinas pertanian cukup baik, meskipun kadang-kadang ada keterlambatan. Saya merasa pelayanan dari petugas dinas pertanian sudah cukup memadai, tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih responsif terhadap kebutuhan kami di lapangan.¹⁰⁰

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pendistribusian pupuk dari Dinas Pertanian dianggap cukup baik meskipun terkadang mengalami keterlambatan. Mereka mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Pertanian

¹⁰⁰ Bapak Jamal, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

sudah cukup memadai, tetapi juga menyuarakan harapan agar pelayanan tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan. Penilaian bahwa pendistribusian pupuk sudah cukup baik menunjukkan bahwa Dinas Pertanian telah melakukan upaya untuk memastikan produk pertanian seperti pupuk tersedia untuk mendukung aktivitas pertanian. Meskipun demikian, keterlambatan yang kadang-kadang terjadi bisa menjadi faktor yang mengganggu bagi petani, terutama dalam konteks waktu tanam yang krusial.

2. Peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani

Hasil penelitian kedua merujuk pada distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani. Distribusi yang dikelola oleh pemerintah mencakup berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka. Berikut bentuk peran distribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani:

Peran Distribusi	Peningkatan Kesejahteraan Petani
	<p><i>Pendapatan</i> Kebijakan harga minimum dan subsidi pemerintah membantu menstabilkan pendapatan petani dengan memastikan mereka menerima harga yang wajar untuk hasil pertanian mereka.</p>
Peran Regulator	<p><i>Akses terhadap sumber daya</i> Regulasi memastikan bahwa semua petani, terutama yang kecil, mendapatkan akses yang adil terhadap pupuk bersubsidi, benih unggul, dan alat-alat pertanian</p>
	<p><i>Kesehatan</i> Regulasi terkait penggunaan pestisida dan bahan kimia memastikan praktik pertanian yang aman, mengurangi risiko kesehatan bagi petani dan konsumen.</p>

<p>Peran Fasilitator</p>	<p><i>Pendapatan</i> Pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan yang membantu petani mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan</p> <p><i>Akses terhadap sumber daya</i> Fasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk distribusi pupuk, benih, dan alat-alat pertanian memastikan bahwa petani memiliki semua yang mereka butuhkan untuk bercocok tanam dengan baik.</p>
<p>Peran Dinamisator</p>	<p><i>Pendapatan</i> Pemerintah mendorong diversifikasi tanaman dan penggunaan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani</p> <p><i>Akses terhadap sumber daya</i> Pemerintah mendorong fasilitas dan teknologi baru untuk diadaptasi ke dalam proses pertanian untuk mempermudah proses pertanian masyarakat.</p>
<p>Peran Pengawasan</p>	<p><i>Pendapatan</i> Pemerintah mengawasi pelaksanaan subsidi dan bantuan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran</p> <p><i>Akses terhadap sumber daya</i> Pemerintah melakukan pengawasan terhadap distribusi sumber daya untuk memastikan bahwa semua petani mendapatkan bagian yang adil</p> <p><i>Pendidikan</i> Pemerintah memantau efektivitas program pelatihan dan penyuluhan untuk memastikan bahwa petani benar-benar mendapatkan manfaat dari program tersebut</p>

Peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani terbukti cukup efektif melalui berbagai kebijakan dan program yang dijalankan. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan harga minimum dan

subsidi yang menstabilkan pendapatan petani serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya penting.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa indikator peningkatan kesejahteraan petani ditunjukkan bahwa:

1. Pendapatan

Program distribusi pemerintah berdampak pada tiga indikator peningkatan kesejahteraan petani, sebagaimana dijelaskan bahwa:

Kebijakan harga minimum sangat membantu kami, terutama saat panen raya. Subsidi pupuk juga mengurangi biaya produksi, sehingga keuntungan kami lebih stabil.¹⁰¹

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut bahwa program distribusi pemerintah memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani melalui kebijakan harga minimum dan subsidi. Kebijakan harga minimum memastikan petani tetap mendapatkan harga yang wajar untuk hasil panennya, terutama pada saat panen raya ketika biasanya harga cenderung turun akibat surplus produksi. Kebijakan ini memberikan stabilitas ekonomi bagi petani dan melindungi mereka dari kerugian besar. Selain itu, subsidi pupuk juga berperan signifikan dalam mengurangi biaya produksi. Dengan subsidi ini, petani tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pupuk berkualitas, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain atau meningkatkan modal usaha.

Kombinasi kedua kebijakan ini membantu menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan mendukung kesejahteraan ekonomi petani. Secara keseluruhan, program distribusi pemerintah dalam bentuk kebijakan harga minimum dan subsidi pupuk

¹⁰¹ Bapak Andis, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

menciptakan jaminan ekonomi yang lebih baik bagi petani, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan mereka

Informan lainnya menjelaskan bahwa:

Dengan adanya bantuan subsidi, modal yang saya keluarkan jadi lebih sedikit. Hasil panen juga ada jaminan harga, meskipun kadang-kadang penyalurannya agak terlambat.¹⁰²

Informan lain mengungkapkan bahwa bantuan subsidi dari pemerintah sangat bermanfaat dalam mengurangi beban biaya produksi. Dengan adanya subsidi, modal yang harus dikeluarkan petani menjadi lebih ringan, sehingga keuntungan mereka meningkat. Hal ini terutama penting bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, adanya jaminan harga melalui kebijakan harga minimum memberikan kepastian bagi petani bahwa hasil panen mereka akan tetap dihargai secara adil. Kebijakan ini membantu melindungi petani dari fluktuasi harga yang sering terjadi, terutama saat panen raya. Namun, informan juga mencatat adanya kendala dalam penyaluran subsidi, yang terkadang mengalami keterlambatan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, subsidi ini tetap memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani.

Informan lainnya juga mendukung penjelasan tersebut menjelaskan bahwa:

Program pemerintah seperti subsidi pupuk dan bantuan benih unggul benar-benar berdampak pada pendapatan kami. Tapi kami berharap pemerintah lebih sering memantau harga di pasar agar tidak ada tengkulak yang bermain harga”.¹⁰³

Informan lain mendukung pandangan sebelumnya dengan menegaskan bahwa program subsidi pupuk dan bantuan benih unggul dari pemerintah secara nyata

¹⁰² Bapak Fadil, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 18 Juli 2024

¹⁰³ Bapak Ridwan, *Petani Kecamatan Duampanua*,. Wawancara 20 Juli 2024

memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani. Subsidi pupuk membantu mengurangi biaya produksi, sementara bantuan benih unggul meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Perlunya pemerintah untuk memantau harga di pasar secara lebih aktif. Hal ini dilakukan agar praktik-praktik tidak adil, seperti permainan harga oleh tengkulak, dapat dicegah. Jika pengawasan pasar diperketat, maka petani akan lebih terlindungi dan bisa menikmati hasil panen dengan harga yang pantas.

2. Akses terhadap Sumber Daya

Distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan atau kuota yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan petani.

Menurut informan bahwa:

Untuk pupuk bersubsidi, kadang ada masalah di distribusi, tapi sekarang sudah lebih baik dibandingkan dulu. Benih unggul yang kami terima juga kualitasnya bagus.¹⁰⁴

Akses terhadap pupuk bersubsidi mengalami perbaikan dibandingkan dengan masa lalu, meskipun masih ada beberapa kendala dalam distribusinya. Masalah seperti keterlambatan atau kuota yang tidak merata menjadi tantangan yang dihadapi, tetapi saat ini kondisinya sudah lebih baik, sehingga petani dapat lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Informan lainnya mendeskripsikan bahwa:

Pemerintah sudah memberikan bantuan alat-alat seperti traktor kecil untuk petani. Ini sangat memudahkan kami. Selain itu, pupuk dan benih subsidi juga mendukung kebutuhan kami.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bapak Andis, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

¹⁰⁵ Bapak Jamal, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

Informan lain memberikan pandangan positif terkait upaya pemerintah dalam menyediakan sumber daya bagi petani. Mereka menjelaskan bahwa bantuan berupa alat-alat pertanian, seperti traktor kecil, sangat mempermudah proses bercocok tanam. Alat-alat ini tidak hanya mengurangi beban kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengolahan lahan. Selain itu, pupuk bersubsidi dan benih unggul juga disebutkan sebagai program yang mendukung kebutuhan petani. Subsidi ini membantu menekan biaya produksi, sementara kualitas benih unggul yang diterima memungkinkan petani untuk memperoleh hasil panen yang lebih baik.

3. Pendidikan

Menurut informan bahwa:

Penyuluhan sangat membantu saya memahami cara mengelola tanah dan memilih benih yang tepat. Sayangnya, program ini kadang tidak merata untuk semua petani.¹⁰⁶

Informan menyatakan bahwa program penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pemahaman petani. Penyuluhan ini membantu mereka mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk mengelola tanah dan memilih benih yang tepat sesuai dengan kondisi lahan mereka. Hal tersebut secara langsung meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani.

Informan lainnya juga menjelaskan bahwa:

Selama ini memang kalau persoalan pendidikan itu wajib untuk di tingkatkan, menurut saya akses pendidikan kita juga bagus dan juga meningkat, kalau bicara soal pendidikannya itu seperti yang saya bilang itu ada pelatihan yang diberikan itu bagus juga melalui pemerintah desa.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Bapak Jamal, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

¹⁰⁷ Bapak Fadil, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 18 Juli 2024

Informan lain menyampaikan bahwa akses pendidikan dan pelatihan bagi petani sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mereka menilai bahwa pendidikan, khususnya dalam bentuk pelatihan yang diberikan melalui pemerintah desa, sangat bermanfaat. Pelatihan membantu petani memahami teknik-teknik baru dalam bercocok tanam, penggunaan alat modern, dan pengelolaan hasil panen secara lebih efisien.

Menurut informan pendidikan dan pelatihan seperti ini sangat penting untuk terus ditingkatkan karena memiliki dampak langsung pada produktivitas dan keterampilan petani. Pelatihan yang diselenggarakan juga dianggap cukup efektif dalam memberikan solusi praktis untuk berbagai masalah pertanian.

Pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan yang mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Distribusi pupuk, benih, dan alat-alat pertanian juga difasilitasi dengan baik.

Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana peranan pemerintah dalam hal Peran Kebijakan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Peran pemerintah untuk kebijakan itu berdasarkan keputusan menteri, jadi kita selalu mengikur dari aturan diatas yang mengatur, seperti halnya pendistribusian itu. kita akan mendistribusikan apa apa saja yang menjadi arahan dari Jukni perintah. tidak boleh ada pendistribusian diluar dari arahan dan perencanaan yang silakukan.¹⁰⁸

Hasil wawancara menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam kebijakan distribusi pertanian sangat terikat pada keputusan dari aturan yang diatur oleh pihak berwenang, seperti keputusan menteri atau regulasi yang berlaku. Pemerintah

¹⁰⁸ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

menjalankan distribusi berdasarkan arahan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, seperti halnya dalam pendistribusian barang-barang pertanian.

Penjelasan hasil wawancara tersebut menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi untuk memastikan bahwa distribusi dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi secara sistematis. Dengan mengacu pada aturan dan kebijakan yang jelas pemerintah dapat menjamin bahwa bantuan atau subsidi yang disalurkan kepada petani merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah kecamatan duampanua Kabupaten Pinrang.

□ Pertanyaan terkait dengan bagaimana peranan pemerintah dalam hal peranan Fasilitator, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Saya kira kalau pemerintah sebagai fasilitator betul, karena memang kita yang memfasilitasi setiap produk pertanian ini. khususnya lagi produk yang termasuk dalam produk subsidi.¹⁰⁹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator dalam konteks distribusi produk pertanian, terutama produk-produk yang termasuk dalam kategori subsidi. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan dan dukungan dalam rangka memfasilitasi distribusi produk-produk ini kepada petani.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa peran sebagai fasilitator mencakup berbagai tugas, seperti mengkoordinasikan proses distribusi dari hulu ke hilir,

¹⁰⁹ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

memastikan ketersediaan produk, dan memfasilitasi interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti dinas pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani. Fasilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk pertanian yang diperlukan oleh petani, seperti benih, pupuk, atau teknologi pertanian lainnya, dapat diakses secara efektif dan efisien.

Pemerintah juga berperan dalam membangun infrastruktur distribusi yang memadai, seperti pengaturan transportasi dan penyimpanan barang, serta menyediakan dukungan teknis dan administratif kepada petani. Peran sebagai fasilitator memungkinkan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani melalui pelayanan yang terorganisir dan terpadu dalam distribusi produk pertanian.

Pertanyaan terkait dengan bagaimana peranan pemerintah dalam hal peranan Dinamisator, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Saya kira kita sebagai dinas pertanian ini memang selalu mendukung aspek pertanian dari atas ke bawah, artinya seluruh elemen yang berkontribusi dalam proses distribusi ini haruslah konsisten dan bekerja sesuai dengan peranannya masing masing. Kita mendistribusikan dengan baik. Kelompok tani juga mendistribusikan dengan baik dan adil serta mendukung semua itu hal hal terkait dengan pendistribusian tadi.¹¹⁰

Kutipan hasil wawancara menjelaskan bahwa pemerintah melalui dinas pertanian memainkan peran sebagai dinamisator dalam proses distribusi produk pertanian. Sebagai dinamisator, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam distribusi baik dari pihak dinas pertanian, kelompok tani,

¹¹⁰ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

hingga pemerintah desa berkontribusi secara konsisten dan sesuai dengan peran masing-masing.

Pemerintah berupaya untuk menjaga konsistensi dalam pendistribusian produk pertanian, memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan baik dan efisien. Mereka mendukung praktik distribusi yang adil dan merata, sehingga semua petani dapat mengakses bantuan dan subsidi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian di Kecamatan Duampanua.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa dengan menjadi dinamisor, pemerintah tidak hanya mengkoordinasikan distribusi produk pertanian, tetapi juga membangun kerjasama yang erat dengan semua pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara menyeluruh. Pendekatan tersebut yang dijelaskan informan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan setiap aspek distribusi demi kepentingan petani dan kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Pinrang.

Pertanyaan terkait dengan bagaimana peranan pemerintah dalam hal peranan Pengawasan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau perana pengawasan saya kira itu kita tugasnya menyalurkan dan mengawasi bagaimana kita betul betul mengawasi apakah seluruh barang yang didistribusikan itu sampai dan sesuai target yang di distribusikan. karena kalau tidak ada pengawasan itu susah disisi lain pelaporannya yang susah dan juga petani tidak mendapatkan pendistribusian yang mereka harapkan.¹¹¹

¹¹¹ Bapak Ismail, *Dinas Pertanian Kab. Pinrang*. Wawancara 19 Juli 2024

Berdasarkan hasil tersebut pemerintah memainkan peran yang krusial dalam pengawasan distribusi produk pertanian. Peran pengawasan ini mencakup dua aspek utama: pertama, memastikan bahwa seluruh barang yang didistribusikan sampai tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan kedua, memastikan bahwa proses distribusi dilaporkan dengan baik agar transparan dan akurat.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam distribusi, mulai dari pengadaan barang hingga penyaluran kepada petani, berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penjelasan hasil wawancara tersebut penting untuk mencegah terjadinya keterlambatan atau kesalahan dalam pendistribusian yang dapat menghambat kesejahteraan petani.

Pengawasan yang ketat juga membantu dalam mengatasi masalah yang timbul selama proses distribusi, seperti pengurangan yang tidak perlu atau penanganan cepat terhadap kendala logistik. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa petani menerima bantuan atau subsidi yang mereka harapkan dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Pertanyaan terkait dengan apakah perana pemerintah efektif selama ini dilakukan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Peraban ini saya kira sangat efektif. Karena memang setiap pendistribusian yang saya lakukan itu kita awasi dengan baik. Cuma memang terkendala dari pendistribusian yang kadang tidak tepat waktu sehingga banyak yang komplain dengan waktu pendistribusiannya. Seperti ketersediaan pupuk yang lambat sehingga petani tidak dapat menggunakan pupuk subsidi tersebut.¹¹²

¹¹² Bapak Andis, *Petani Kecamatan Duampanua*. Wawancara 19 Juli 2024

Hasil wawancara menyebutkan bahwa informan menganggap peran pemerintah dalam distribusi produk pertanian sebagai efektif meskipun menghadapi beberapa kendala tertentu. Pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam setiap tahap distribusi produk pertanian dianggap penting dan berhasil dalam memastikan bahwa proses distribusi berlangsung dengan baik.

Hasil wawancara yang dijelaskan bahwa kendala utama yang disorot adalah keterlambatan dalam pendistribusian, terutama terkait dengan ketersediaan pupuk subsidi yang sering tidak tepat waktu. Keterlambatan ini mengakibatkan ketidakpuasan dari petani yang mengandalkan bantuan tersebut untuk proses pertanian mereka. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pengawasan sudah ada namun masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pendistribusian produk pertanian.

B. Pembahasan

1. Distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang

Pembahasan penelitian merujuk pada distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang dijelaskan bahwa proses distribusi mencakup berbagai tahap dan melibatkan beberapa pihak terkait untuk memastikan bantuan dan subsidi mencapai petani secara efektif dan tepat sasaran. Distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan proses yang terstruktur mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan dan koordinasi, pengadaan barang, hingga penyaluran produk. Setiap tahap melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk kelompok tani, Dinas Pertanian, dan pemerintah

desa, untuk memastikan bantuan dan subsidi dapat disalurkan tepat sasaran dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas distribusi dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Pinrang.

Tahapan pendistribusian produk pertanian dilakukan yaitu tahapan identifikasi kebutuhan. Perencanaan dan koordinasi dalam alur distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian dimana tahapan perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan di mana kelompok tani memiliki peran kunci dalam menentukan apa yang dibutuhkan. Dinas Pertanian berfungsi sebagai fasilitator yang mengambil rencana dan daftar kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam teori peran yang dijelaskan bahwa perilaku yang diharapkan dari setiap aktor dalam sistem distribusi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan status mereka dalam masyarakat.¹¹³ Kelompok tani, Dinas Pertanian, dan pemerintah desa tidak hanya berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan atau menyalurkan bantuan, tetapi juga mempengaruhi keberhasilan distribusi berdasarkan bagaimana mereka menjalankan peran mereka sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Penjelasan mengenai distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang yang mencakup berbagai tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan barang, hingga penyaluran produk, dapat dianalisis melalui teori peran dalam ilmu sosial. Teori peran mengacu pada

¹¹³ Hamid, Hendrawati. "Menajemen Pemberdayaan Masyarakat": De La Macca. 2018. h.87

perilaku yang diharapkan dari individu dalam situasi sosial tertentu berdasarkan posisi atau status yang mereka miliki.¹¹⁴

Dinas Pertanian memainkan peran penting sebagai fasilitator dalam proses distribusi. Dalam teori peran, dinas pertanian memiliki status sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan distribusi dan mengkoordinasikan berbagai pihak. Dinas ini menjalankan peran administratif, mengambil daftar kebutuhan yang disusun oleh kelompok tani, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui program subsidi dan bantuan pemerintah. Tindakan dinas pertanian mencerminkan fungsi koordinasi yang menjadi peran penting dalam sistem distribusi yang terstruktur.¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa setiap aktor berperan sesuai dengan status dan kedudukan mereka dalam struktur sosial. Melalui peran mereka yang dinamis dan saling terkait, setiap pihak berkontribusi pada keberhasilan distribusi yang efektif dan tepat sasaran, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan petani.¹¹⁶

Setelah kebutuhan teridentifikasi dilakukan alokasi perencanaan untuk menentukan apa yang dapat direalisasikan dan apa yang tidak bisa direalisasikan. Proses ini dijelaskan berbagai faktor termasuk ketersediaan sumber daya, anggaran, serta prioritas dan kepentingan yang telah disepakati. Dengan demikian, perencanaan distribusi produk pertanian tidak hanya mengikuti kebutuhan yang

¹¹⁴ Adedevi. *Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*. ([http://carapedia.com/pengertian definisi peran](http://carapedia.com/pengertian-definisi-peran)) Akses 19 Juni 2024

¹¹⁵ Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Grasindo, Jakarta. 2021)

¹¹⁶ Kasming, *Peran Dalam Pemberdayaan Kelompk Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Lompoloang kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

diajukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek realisasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan bantuan dan subsidi bagi petani di Kabupaten Pinrang. Dalam hasil penelitian bahwa ketika kelompok tani mengajukan list kebutuhan dan keinginan kepada Dinas Pertanian seperti jumlah dan jenis pupuk subsidi yang direkomendasikan, Dinas Pertanian kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap list tersebut.

Informan menjelaskan bahwa meskipun kelompok tani memiliki peran dalam mengajukan kebutuhan mereka dan terdapat beberapa pertimbangan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian terkait ketersediaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi rencana. Dalam proses pengajuan kebutuhan kepada Dinas Pertanian kelompok tani menyusun daftar yang mencakup jumlah dan jenis pupuk subsidi yang direkomendasikan.

Proses selanjutnya mencakup realisasi perencanaan, di mana apa yang direncanakan oleh kelompok tani tidak selalu dapat direalisasikan sepenuhnya. Faktor-faktor seperti anggaran, ketersediaan stok, dan kondisi lapangan dapat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi semua permintaan yang diajukan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok tani memiliki peran penting dalam mengajukan kebutuhan mereka namun ada tahap evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan kondisi yang ada. Dengan demikian, proses perencanaan dan koordinasi dalam distribusi produk pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan kerjasama antara kelompok tani dan Dinas Pertanian, dengan tujuan akhir untuk

mencapai distribusi yang efisien dan efektif serta mendukung kesejahteraan petani.

Penyaluran produk pertanian di Kabupaten Pinrang melibatkan proses yang terstruktur dan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan distribusi yang efektif dan tepat sasaran. Penyaluran produk secara langsung ke petani dimulai dengan proses pendaftaran melalui kelompok tani atau langsung ke Dinas Pertanian, diikuti dengan verifikasi data untuk memastikan bahwa petani memenuhi kriteria penerima bantuan. Setelah verifikasi, produk pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pertanian disalurkan langsung ke petani sesuai kebutuhan yang tercatat.

Dinas Pertanian mengatur jadwal distribusi dan memastikan barang dikirim tepat waktu ke lokasi petani. Kerjasama dengan kelompok tani mempermudah distribusi, dengan kelompok tani berperan dalam verifikasi dan pendataan anggota. Petugas lapangan dari Dinas Pertanian mengawasi proses distribusi dan mengatasi kendala yang muncul, memastikan bahwa produk sampai ke petani yang berhak menerimanya. Selain penyaluran langsung, distribusi juga dilakukan melalui pemerintah desa untuk menjangkau petani di daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah desa mendata petani yang membutuhkan bantuan dan mendistribusikan produk pertanian dari Kantor desa ke petani setempat, bertindak sebagai perantara antara Dinas Pertanian dan petani, serta memastikan bantuan sampai kepada petani.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sejalan dengan bagaimana pengawasan distribusi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kelompok tani, dan petugas lapangan, dengan mekanisme

pelaporan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akurasi. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai rencana.¹¹⁷ Pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Pertanian dinilai cukup memadai, namun ada harapan agar pelayanan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan, untuk mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pinrang Kecamatan Dumapanua.

2. Peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani

Pembahasan penelitian merujuk pada penjelasan tentang distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani dijelaskan bahwa peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara, peran pemerintah sangat terkait dengan kebijakan yang diatur oleh pihak berwenang, seperti keputusan menteri atau regulasi yang berlaku. Pemerintah mendistribusikan produk pertanian berdasarkan arahan yang telah ditetapkan dalam peraturan resmi untuk memastikan bahwa distribusi dilakukan tepat sasaran. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan bantuan dan dukungan, terutama untuk produk-produk subsidi, dengan mengkoordinasikan proses distribusi dari hulu ke hilir, memastikan ketersediaan produk, dan memfasilitasi interaksi antara pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam peran dinamisor pemerintah melalui dinas pertanian memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam distribusi, seperti kelompok tani dan pemerintah desa, berkontribusi konsisten sesuai dengan peran masing-masing.¹¹⁸ Pemerintah berupaya menjaga konsistensi

¹¹⁷ Dwiyanto, *Reformasi Pelayanan Publik, Policy Brief*, (UGM, Yogyakarta, 2021)

¹¹⁸ Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021)

dan efisiensi dalam pendistribusian produk pertanian, mendukung distribusi yang adil dan merata, sehingga semua petani dapat mengakses bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian.

Peran pengawasan pemerintah sangat krusial dimana mencakup dua aspek utama: memastikan seluruh barang yang didistribusikan sampai tepat waktu dan sesuai dengan target, serta memastikan proses distribusi dilaporkan dengan baik agar transparan dan akurat. Pengawasan ketat membantu mengatasi masalah yang timbul selama distribusi, memastikan petani menerima bantuan yang diharapkan dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai.¹¹⁹ Meskipun pengawasan dianggap efektif, kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pendistribusian, terutama terkait ketersediaan pupuk subsidi yang sering tidak tepat waktu.

Hasil pembahasan mendeskripsikan bahwa pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem distribusi dengan melakukan evaluasi rutin dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan. Peranan pemerintah dalam distribusi produk pertanian sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di wilayah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Pemerintah menetapkan kebijakan distribusi produk pertanian yang didasarkan pada keputusan menteri dan regulasi yang berlaku. Kebijakan tersebut memastikan bahwa distribusi dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani.¹²⁰ Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur,

¹¹⁹ Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021)

¹²⁰ Soerjono. *Teori Peranan*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2020)

pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan subsidi dengan efektif, mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa petani yang benar-benar membutuhkan mendapat dukungan yang diperlukan.

Pemerintah menyediakan bantuan dan dukungan dalam bentuk koordinasi distribusi produk pertanian, terutama untuk produk-produk subsidi. Pemerintah memastikan ketersediaan benih, pupuk, dan teknologi pertanian lainnya serta memfasilitasi interaksi antara dinas pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani. Fasilitas ini membantu petani mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup memastikan bahwa seluruh barang yang didistribusikan sampai tepat waktu dan sesuai target serta bahwa proses distribusi dilaporkan dengan transparan dan akurat. Pengawasan ketat membantu mengatasi masalah seperti keterlambatan atau penyimpangan dalam distribusi, memastikan bahwa petani menerima bantuan yang mereka harapkan.¹²¹ Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang timbul, menjaga kepercayaan petani dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Pembahasan penelitian merujuk pada teori peran menyatakan bahwa individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki peran tertentu yang terkait dengan status sosial mereka dan fungsi yang mereka jalankan dalam suatu sistem sosial. Peran ini melibatkan serangkaian tindakan yang diharapkan atau dipenuhi oleh individu sesuai dengan kedudukan mereka dalam struktur sosial tersebut.¹²²

¹²¹ Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021)

¹²² Thomas. *Role Theory: Concepts and Research*. (New York: Wiley, 2020)

Pemerintah berfungsi sebagai penghubung yang mempertemukan petani dengan sumber daya yang diperlukan, yang dalam konteks ini adalah distribusi produk pertanian. Sebagai fasilitator, pemerintah juga membantu mengatur interaksi antar aktor, memastikan bahwa setiap pihak menjalankan peran mereka secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Analisis syariah terhadap peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani

a. Prinsip Tauhid

Hasil penelitian terkait dengan peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani relevan dengan konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik sejati dari segala sumber daya, termasuk hasil pertanian. Dalam distribusi program pertanian, prinsip tauhid mengingatkan bahwa tujuan utama dari distribusi adalah untuk memastikan bahwa hasil pertanian didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh petani, sesuai dengan kebutuhan dan upaya mereka. Penjelasan analisis tauhid ini mencerminkan pengelolaan yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang diberikan oleh Allah.

Konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik sejati dari segala sumber daya, termasuk hasil pertanian. Dalam distribusi program pertanian, prinsip tauhid mengingatkan bahwa tujuan utama dari distribusi adalah untuk memastikan bahwa hasil pertanian didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh petani, sesuai dengan kebutuhan dan upaya mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hajj: 64 bahwa:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٢٣﴾

Terjemahnya:

Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya lagi Maha Terpuji.¹²³

Ayat diatas mendeskripsikan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, yang Mahakaya dan Maha Terpuji. Ayat ini menegaskan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah sebagai pemilik sejati dari segala sumber daya. prinsip tauhid mengajarkan bahwa tujuan utama dari distribusi adalah untuk memastikan bahwa hasil pertanian didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh petani, sesuai dengan kebutuhan dan upaya mereka.

Peran dinas pertanian sebagai pengelola distribusi haruslah dilandasi dengan kesadaran bahwa semua upaya distribusi adalah bagian dari tugas sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya secara adil dan merata kepada seluruh petani. Hal ini mendorong dinas pertanian untuk menjalankan distribusi dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan umum.

b. Prinsip Adil

Prinsip keadilan (adl) dalam Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam ekonomi. Dalam konteks penelitian ini terkait dengan peranan dinas pertanian, distribusi program-program pertanian harus dilakukan secara adil agar semua petani memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka. Adl'

¹²³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Latnah Press:2015)

memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam distribusi bantuan dan semua petani mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.¹²⁴

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam ekonomi. Distribusi program-program pertanian harus dilakukan secara adil agar semua petani memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 32 bahwa:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²⁵

Ayat diatas mengingatkan agar tidak iri hati terhadap pemberian Allah kepada orang lain, dan bahwa setiap orang mendapat bagian yang sesuai dengan usahanya. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan (adl) dalam Islam, yang penting dalam konteks distribusi program-program pertanian oleh dinas pertanian. Prinsip keadilan mengharuskan agar distribusi program-program pertanian dilakukan secara adil, di mana setiap petani memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan.¹²⁶ Tidak boleh ada diskriminasi dalam

¹²⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h.67

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Latnah Press:2015)

¹²⁶ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h.87

pendistribusian bantuan atau sumber daya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bahwa setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan usahanya. Hal ini menegaskan bahwa distribusi harus mengutamakan keadilan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Dinas pertanian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua petani memiliki akses yang sama terhadap bantuan dan dukungan pertanian yang diperlukan. Penjelasan tersebut berarti tidak ada diskriminasi dalam distribusi pupuk, benih, atau bantuan lainnya, sehingga setiap petani memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraannya.

c. Prinsip Sidiq

Hasil penelitian merujuk pada sifat kejujuran dan kebenaran (sidiq) menjadi landasan dalam distribusi program pertanian. Informasi yang diberikan kepada petani mengenai program-program pertanian haruslah jujur dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani dalam mencapai kesejahteraan mereka. Prinsip ini memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada petani dapat dipercaya dan tidak mengecewakan harapan mereka.

Sifat kejujuran dan kebenaran (sidiq) menjadi landasan dalam distribusi program pertanian. Informasi yang diberikan kepada petani haruslah jujur dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hashr: 18 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹²⁷

Ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya takwa kepada Allah dan perhatian terhadap apa yang telah dikerjakan untuk hari esok (akhirat). Ayat ini mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman harus menjaga kejujuran dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi program-program seperti pertanian.

Prinsip sidiq (kejujuran dan kebenaran) mengharuskan agar informasi yang diberikan kepada petani haruslah jujur dan transparan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan bahwa kejujuran merupakan landasan yang kuat dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Informasi yang jujur dan transparan dalam distribusi akan memastikan bahwa petani dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengandalkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam ayat tersebut.¹²⁸

Peranan Dinas pertanian harus transparan dalam menyampaikan informasi terkait persyaratan, prosedur, dan manfaat dari program pertanian kepada petani.

¹²⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Latnah Press:2015)

¹²⁸ Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (2018) h.56

Hal ini menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa petani dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jujur dan akurat.

d. Prinsip Tablig

Hasil penelitian merujuk pada aspek tabligh yaitu mengajarkan pentingnya menyampaikan informasi dan bimbingan kepada petani mengenai program-program pertanian yang tersedia. Distribusi program pertanian harus mencakup upaya komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa petani memahami dan dapat mengambil manfaat dari program-program tersebut. Tabligh memastikan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan petani terjalin dengan baik.

Dinas pertanian harus aktif dalam berkomunikasi dengan petani, baik dalam hal penyuluhan, pelatihan, maupun evaluasi terhadap program-program yang ada. Komunikasi yang baik ini memastikan bahwa petani memahami tujuan dari setiap program dan dapat mengambil manfaat yang optimal dari bantuan yang diberikan.

Hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa distribusi program pertanian, prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, adl' (keadilan), sidiq (kejujuran), dan tabligh memiliki relevansi yang sangat penting. Konsep tauhid mengajarkan bahwa semua sumber daya, termasuk hasil pertanian, adalah milik Allah, yang memerlukan distribusi yang adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan petani.¹²⁹ Prinsip adl' menuntut agar distribusi dilakukan tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua petani untuk mengakses sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan. Nubuwwah menekankan pentingnya penyuluhan dan bimbingan efektif untuk memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan, sementara sidiq menegaskan perlunya informasi yang jujur dan

¹²⁹ Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2021)

transparan kepada petani untuk memastikan kepercayaan dan kesejahteraan yang maksimal.¹³⁰

Prinsip amanah mendorong dinas pertanian untuk bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola distribusi dengan efisien, memastikan bahwa bantuan dan sumber daya digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terakhir, prinsip tabligh menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan petani, memastikan bahwa informasi mengenai program pertanian tersedia secara jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait.

Pembahasan penelitian merujuk pada syariah terhadap peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani dijelaskan bahwa peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang mendasari pengelolaan sumber daya secara adil dan bertanggung jawab.¹³¹ Pertama, konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik sejati dari segala sumber daya, termasuk hasil pertanian.

Dalam konteks distribusi program pertanian, prinsip tauhid mengingatkan bahwa tujuan utama adalah memastikan hasil pertanian didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh petani sesuai dengan kebutuhan dan upaya mereka. Prinsip tauhid mengajarkan pengelolaan yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang diberikan oleh Allah, mendorong dinas pertanian untuk menjalankan distribusi dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan umum. Kedua, prinsip keadilan (adl') dalam Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam ekonomi. Setiap orang

¹³⁰ Abdul Manan H, *Hukum Ekonomi Syariah, .Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015) h.34

¹³¹ Abdullah, *Ma'ruf: Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020)

mendapat bagian yang sesuai dengan usahanya dan tidak boleh ada diskriminasi dalam distribusi bantuan. Prinsip adil mengharuskan dinas pertanian untuk memastikan bahwa semua petani memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka, tanpa adanya diskriminasi dalam distribusi pupuk, benih, atau bantuan lainnya.¹³²

Kedua, sifat kejujuran dan kebenaran (sidiq) menjadi landasan dalam distribusi program pertanian mengajarkan pentingnya takwa kepada Allah dan perhatian terhadap apa yang telah dikerjakan untuk hari esok (akhirat). Prinsip sidiq mengharuskan agar informasi yang diberikan kepada petani haruslah jujur dan transparan, menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa petani dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jujur dan akurat.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas diketahui bahwa distribusi program pertanian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, adl', sidiq, dan tabligh sangat relevan dan penting dalam memastikan peningkatan kesejahteraan petani. Prinsip-prinsip ini mengajarkan pengelolaan sumber daya yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan.

Kesejahteraan dalam perspektif Islam mencakup keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam kehidupan individu dan masyarakat. Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi yang ideal di mana setiap individu dapat hidup dalam keadaan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang baik. Konsep kesejahteraan

¹³² Abdul Manan H, *Hukum Ekonomi Syariah, .Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015) h.34

ini tidak hanya terbatas pada pencapaian materi atau kekayaan duniawi, tetapi juga meliputi aspek moral dan hubungan sosial yang baik dengan sesama dan Tuhan.

Relevansi konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam dengan hasil penelitian tentang distribusi program pertanian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, *adl'*, *sidiq*, dan *tabligh* sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.¹³³ Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek materi, seperti pendapatan dan sumber daya yang diperoleh, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang menciptakan harmoni antara individu, masyarakat, dan Tuhan.

Prinsip *adl'* (keadilan) menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan konsep kesejahteraan dalam Islam, yang mencakup pemerataan sumber daya bagi seluruh umat. Distribusi yang adil memastikan bahwa petani memperoleh akses yang sama terhadap bantuan pertanian, seperti pupuk dan benih, yang penting untuk meningkatkan produksi mereka. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan materi harus dicapai dengan cara yang tidak merugikan pihak lain, dan distribusi yang adil adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pembahasan penelitian ini relevan dengan teori peran bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Atau bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.¹³⁴ Bila yang diartikan dengan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah

¹³³ Biddle, *Role Theory : Concept and Research*. (New York: Wiley, 2020)

¹³⁴ Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2020)

perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹³⁵ Peranan yang digambarkan dalam teori diatas relevan dengan peranan pemerintah yang diharapkan memainkan peran sebagai regulator dengan menetapkan kebijakan harga minimum dan subsidi untuk memastikan petani menerima pendapatan yang stabil dan wajar. Penjelasan tersebut adalah perilaku yang diharapkan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi petani.

Peranan diatas sejalan dengan peranan pemerintah untuk menunjukkan perilaku yang diharapkan dari suatu entitas yang memiliki posisi kunci dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori peran yang mengharapkan perilaku tertentu dari individu atau institusi dalam status tertentu. Dengan demikian, distribusi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah menjadi relevan dengan teori peran, karena pemerintah memenuhi harapan-harapan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Analisis ekonomi Islam menjelaskan bahwa distribusi sumber daya, seperti yang diterapkan dalam program pertanian, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang adil, efisien, dan bertanggung jawab. Ekonomi Islam mengutamakan keadilan dalam distribusi, yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat, dalam hal ini petani, harus menerima bagian yang sesuai dengan usaha dan kebutuhan mereka, tanpa adanya penindasan atau diskriminasi.¹³⁶

¹³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran, Akses <http://www.kbbi.web.id/peran>, (Jumat, 27 Januari 2019, 11:27 WIB)

¹³⁶ Whetstone, Linda., *Islam dan Kebebasan Argumen Islam untuk Masyarakat Bebas*, (Institute of Economic Affairs, 2021)

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup keseimbangan antara pencapaian materi, kedamaian sosial, dan kesejahteraan spiritual. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam distribusi program pertanian memastikan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya dilihat dari aspek pendapatan atau kekayaan duniawi, tetapi juga dari hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama. Dalam konteks ini, kesejahteraan mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual, yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara holistik.

Distribusi program pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah tidak hanya memberikan manfaat material bagi petani, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial dan spiritual mereka.¹³⁷ Prinsip keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan komunikasi yang efektif, yang merupakan bagian dari teori peran dalam masyarakat, memastikan bahwa pemerintah menjalankan perannya dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

¹³⁷ Syaikh, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Distribusi pemerintah dalam bidang pertanian di Kabupaten Pinrang dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan, penyaluran, pendistribusian, pengawasan dan pengontrolan pada produk pertanian, teknologi dan aspek pasar dengan pihak pemerintah desa diberikan kepada kelompok tani untuk peningkatan ketersediaan kebutuhan pertanian petani di Kecamatan Duampanua.
2. Peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai regulator yaitu menetapkan kebijakan, membangun infrastruktur dan memfasilitasi distribusi pertanian serta melakukan pengawasan efektivitas dan efisiensi program sebagai upaya peningkatan pendapatan petani dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
3. Analisis syariah terhadap peran distribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Petani menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan secara adil dalam proses distributif serta mengimplementasikan seluruh prinsip ekonomi syariah yaitu tauhid, adil, nubuwwah, siddiq, amanah dan tablig dalam proses pendistribusiannya dalam meningkatkan kesejahteraan Petani.

B. Saran

1. Kepada Dinas Pertanian, diharapkan untuk tetap konsisten dalam proses pendistribusian secara merata kepada seluruh daerah di Kabupaten Pinrang.
2. Kepada Petani, diharapkan untuk senantiasa melakukan pengawasan dan melakukan control terhadap proses pendistribusian produk pertanian yang dilakukan oleh Dinas pertanian.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan menggunakan variabel lain selain peran Dinas pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2018)
- Abdul Manan H, *Hukum Ekonomi Syariah, .Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015)
- Abdul, Manan H. *Hukum Ekonomi Syariah, .Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* (Jakarta: Kencana Prenada Media.2015)
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan,* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2016)
- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia,* (Jakarta, Adedevi. *Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli.* (<http://carapedia.com/>)
- Afandi Yazid, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019)
- Agus Setiawan, Tetty Wijayanti, “Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Memotivasi Petani Melakukan UsahaTani Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palkaran Kota Samarinda”. *Ekonomi Pertanian dan Pembangunan.* Vol. 14 No.2, September 2017, h. 78.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Akbar, Muhammad, Zainal Said, dan Rusnena. “Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang”*BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1 (2), 59-69, 2019.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Al-Hakim, *Al-Adabul Mufrad Juz Iv* (Kairo: Darwa Mathba Asy-Sya’biy)
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Amin. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era
- Andi Ahmad Taqwa, Tesis: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Petani Padi di Kabupaten Pinrang”, (Makassar, 2021), h. 2.
- Aryo Fajar Sunartomo, Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Jawa Timur (Jawa Timur), *Agriekonomika* 5(2). 2021.

- Asmawati Satti, Skripsi: “Kebijakan Pembangunan Pertanian (Pemberdayaan Usaha Tani Bawang Merah di Desa Dulang Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 54-62.
- Astuti, An Ras. (2022) Upaya Pembelaan Komunitas Generasi Petani Perempuan atas Perempasan Hak Atas Air di Kelurahan Lemoe Parepare.
- Daft L, Richard. *Manajemen*. (Jakarta : Erlangga, 2018)
- Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol (13) (2) : 36-49
- Didit. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Surabaya:
- Dwi Iriani Margayaningsih, “Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa”, 2019, h. 4.
- Empat, 2018)
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Gunawan. *Ekonomi Produksi*. (Yogyakarta : Gajahmada
- Hamid, Hendrawati. “Menajemen Pemberdayaan Masyarakat”: De La Macca. 2018. Indonesia, 2020)
- Iska, *Lembaga Syariah* (Batu sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran, Akses <http://www.kbbi.web.id/peran>, (Jumat, 27 Januari 2019, 11:27 WIB)
- Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah),
- Kasming, Peran Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompolang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Lompolang kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 10
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)
- Lasiman Sugiri, “ Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Publica* 2019, Vol 2 (1), h. 7
- Latief, AH. Azharudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015)
- Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta : Bagian Penerbitan
- M Iqbal Hasan, ‘Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya’ (Jakarta, 2022).8
- M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2012)

- Maimuna Talaohu, Izac Tonny Matitaputti dan Maryam Sangadji, Peran Pertanian dan Pengembangannya di Kabupaten Buru, (<https://media.neliti.com/publications/238163-analisis-peranan-sektor-pertanian-dan-pe-f71955a0.pdf>). Di akses pada tanggal 20 Agustus 2020
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Marthen Moonti, Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, (Jurnal Ilmiah Hukum, 2019), Vol 20 (2), h. 28.
- Media Group, Jakarta, 2018)
- Moh Nazir, 'Metode Penelitian Cetakan Kelima', *Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023.*
- Mohd Riswan bin Jamal, Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi Menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis, (Skripsi : Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), h. 9
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)
- Mulia Ananda, Skripsi." Pengaruh Produktivitas Pertanian Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Padi di Desa Buabua 1, Kabupaten Pinrang (Persepektif Ekonomi Syariah)." (IAIN Parepare, 2024). Hal. 90-92.
- Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021)
- Narbuko Cholid and Abu Achmadi, 'Metode Penelitian, Cet V' (Bandung: Bumi Aksara, 2021).
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam* , (Solo: PT. Era Audicitra Intermedia, 2011)
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: PT. Interpretama Mandiri, 2016)
- Paul McMahan, Berebut Makan Politik Baru Pangan, Roem Topatimasang, (Yogyakarta: Insistpress, Yogyakarta, 2017), h. 16.
- Penerbit PT. Jepe Press Media Utama, 2018)
- pengertian definisi peran)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Rini Dwiastuti, Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, (Malang: UB Press, 2019), h. 7.
- Rivai, *Veithzal. Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2022), h. 24

- Robert. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Salemba
- Salmiah Mattoreang, Skripsi : ”Konsep Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ibnu Khaldun,”(IAIN Parepare, 2022). Hal 57-59
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Ghalia, Jakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2021)
- Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)
- Stella Grace Ira Pogaga, Paulus Kindangen, Rosalina AM koleangan, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2021, Vol 21 (1). hal 54-70.
- Sudirman, Lu, Damirah, I Nyoman Budiono, “Pengembangan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare”. DIKTUM : *Jurnal Syariah dan Hukum* 16 (1), 16-31, 2018 hal 28-29.
- Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (PT. Kencana Prenada
- Suwari Akhmaddhian, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningaan), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No 3 September 2013.
- Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (2018)
- Syariah Semaun, , “Dampak Pandemi Covid-19: Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global.”(IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). Hal. 7.
- Trigati Widya Lestari Wibowo, Tesis: “Peningkatan Produktivitas Pertanian Padi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mewujudkan Smart Agriculture dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Dinamik”(Surabaya:ITSN, 2019), h. 8-9
- University Press, 2020)
- W.J .S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735.
- Zainudin Ali, *Hukum ekonomi Syariah*, “Jakarta : Sinar Grafika, 2019)



LAMPIRAN

Lampiran 01: Pedoman Wawancara

PERTANYAAN RUMUSAN MASALAH FOKUS PADA DISTRIBUSI PEMERINTAH DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG

1. Bagaimana distribusi yang dilakukan pemerintah terhadap produk produk pertanian?
2. Bagaimana distribusi dilakukan pemerintah terhadap produk teknologi pertanian?
3. Bagaiaman distribusi pemerintah terhadap Kebutuhan pasar pertanian?
4. Bagaimana distribusi dilakukan di Desa dan Perkotaan?
5. Bagaimana proses pendistribusian yang dilakukan?
6. Apakah seluruh pendistribusian yang dilakuka efektif dirasakan oleh Petani?

PERTANYAAN RUMUSAN KEDUA FOKUS PADA PERAN DISTRIBUSI PEMERINTAH DALAM MEINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

1. Bagaimana peranan pemerintah dalam hal Peran Kebijakan?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam hal peranan Fasilitator?
3. Bagaimana peranan pemerintah dalam hal peranan Dinamisor?
4. Bagaimana peranan pemerintah dalam hal peranan Pengawasan?
5. Apakah peranan pemerintah efektif selama ini dilakukan ?

Lampiran 02 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3162/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

01 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: GINA PRATIWI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 07 Agustus 1999
NIM	: 18.2400.010
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: KAMPUNG JAYA TIMUR, KELURAHAN JAYA, KECAMATAN WATTANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

DISTRIBUSI PROGRAM PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 03 : Surat Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0405/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-07-2024 atas nama GINA PRATIWI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0799/R/T.Teknis/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 04-07-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (RAP) Nomor : 0409/RAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 04-07-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : GINA PRATIWI
4. Judul Penelitian : DISTRIBUSI PROGRAM PERTANIAN KABUPATEN PINRANG DALAM MENINGKATKAN KESAJAHTERAAN PETANI (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI DI KECAMATAN DUAMPANUA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanus

KEDUA

: Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-01-2025.

KETIGA

: Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 04 Juli 2024



Blaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Lampiran 04 : Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
 Jalan Poros Pinrang Polman Nomor 393 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
 Telepon (0421) 3913416

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 47 /KDP/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.

NIP : 19740612 200502 1 006

Jabatan : Camat Duampanua

Menerangkan bahwa :

Nama : GINA PRATIWI

NIM : 18.2400.010

Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melaksanakan Penelitian yang dilaksanakan pada 04 Juli 2024 s/d 04 Agustus 2024 di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Tinjauan Ekonomi Syariah)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, sebagai bahan seperlunya.



09 Agustus 2024
 ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.
 Pembina Tk.I/(IV.b)
 NIP 197406122005021006

Lampiran 05 : Dokumentasi





BIODATA PENULIS



Nama GINA PRATIWI Lahir di Pinrang, 07 Agustus 1999. Anak ke-5 dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Alm.Mustamin dan Ibu Samma. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 250 Kota Pinrang dan Lulus tahun 2012 , SMPN 4 Pinrang masuk pada tahun 2013 dan lulus tahun 2015, melanjutkan jenjang di SMKN 1 Pinrang dan lulus tahun 2018. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Ekonomi Syariah, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di Pertamina Fuel Terminal Parepare pada Tahun 2022 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Pinrang pada tahun 2022 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Distribusi Program Pertanian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Tinjauan Ekonomi Syariah).”